

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN  
RASIO PERTUMBUHAN PADA KANTOR DESA  
ABBANUANGNGE KABUPATEN WAJO**

**SKRIPSI**



**105721130418**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2025**

JUDUL PENELITIAN:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN  
RASIO PERTUMBUHAN PADA KANTOR DESA  
ABBANUANGNGE KABUPATEN WAJO**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**RAHMI  
NIM:105721130418**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2025**

## MOTTO

**“Hanya karna tidak secepat orang lain, bukan berarti gagal sebagai manusia. Semua memiliki cerita waktu dan garis takdir sendiri. Hidup bukan perihal siapa yang tercepat tapi siapa yang bertahan sampai akhir”**

**“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati Saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar.**

**Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau**

**ceritakan”**

**(Boy Candra)**

## PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT yang maha kuasa, berkat dan Rahmat detak jantung denyut nadi, nafas dan perputaran roda kehidupan yang diberikan-Nya sehingga sampai saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi saya ini untuk kedua orang tuaku tercinta yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya serta memberikan dukungan baik moral ataupun materi. Terimakasih banyak atas pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik saya selama ini.**

## PESAN DAN KESAN

**Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866927 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Abbanuangne Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : RAHMI

NIM : 105721130418

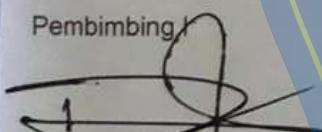
Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia Penguji Skripsi strata (S1) pada tanggal 23 agustus 2025 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Agustus 2025

Pembimbing I  
  
Dr. Ruliaty, M.M

NIDN: 8883123419



Asri Jaya, S.E., M.M  
NIDN: 0926088303

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Edi Jusnadi, S.E., M.M  
NBM: 1038186

Ketua Program Studi  
Manajemen

Masrullah, S.E., M.M  
NBM: 1151132



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama RAHMI, NIM : 105721130418, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor:0013/SK-Y/61201/091004/2025 M, Tanggal 29 Shafar 1447 H/ 23 Agustus 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Shafar 1447 H  
23 Agustus 2025 M

- PANITIA UJIAN
1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, S.T., M.T.  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M.  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suami, S.E., M.ACC  
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji
- 1. Dr. Ruliaty, M.M
  - 2. Asriyaya, S.E., M.M
  - 3. Nasrullah, S.E., M.M
  - 4. Zalkha Soraya, S.E., M.M

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M  
NBM : 1036166



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866927 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : RAHMI

Stambuk : 105721130418

Program studi : Manajemen

Judul skripsi : Analisis Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Abbauangnge Kabupaten Wajo

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**RAHMI**  
NIM: 105721130418

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Dr. Edi Justriadi, SE., MM**  
NBM: 1038166

Tanggal :

Ketua Program Studi Manajemen,

**Nasrullah, S.E., M.M**  
NBM: 1151132

Tanggal :

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi  
NIM : 105721130418  
Program Studi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

***Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Rahmi  
NIM:105721130418

## ABSTRAK

**RAHMI. 2025**, Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo". Skripsi program studi Manejemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ruliaty dan Asri Jaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo tahun 2017 sampai tahun 2021". Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian ini berdasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo juga mengalami pertumbuhan secara positif dari tahun 2017-2021 sebesar 14,65%. Dan hasil perhitungan rasio Efektivitas kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo untuk tahun 2017-2021 dikategorikan Efektif walaupun terjadi penurunan di tahun 2021 sebesar 99,85% tetapi masih dikategorikan Efektif.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan

## **ABSTRACT**

**RAHMI. 2025, Financial Performance Analysis of Village Fund Allocation Management Based on Effectiveness Ratios and Growth Ratios at the Abbanuangnge Village Office, Wajo Regency". Thesis of Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Ruliaty and asri Jaya**

*This study aims to find out how the Financial Performance of Village Fund Allocation Management is Based on the Effectiveness Ratio and Growth Ratio at the Abbanuangnge Village Office, Wajo Regency in 2017 to 2021". This research was conducted at the Abbanuangnge Village Office, Wajo Regency. The type of research used in this research is qualitative research. This research is a quantitative research.*

*The results of this study based on the calculation of the Village Fund Allocation Expenditure Ratio (ADD), the Financial Performance of the Village Fund Allocation (ADD) at the Abbanuangnge Village office, Wajo Regency also experienced positive growth from 2017-2021 by 13.6%. And the results of the calculation of the Effectiveness ratio of the financial performance of the Village Fund Allocation (ADD) of the Abbanuangnge Village office, Wajo Regency for 2017-2021 are categorized as Effective even though there was a decrease in 2021 of 99.85% but it is still categorized as Effective.*

**Keywords:** Financial Performance Effectiveness Ratio, Growth Ratio



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala peujian atas kehadirat Allah SWT, Yang Maha Menguasai semesta ini. Rasa syukur yang sangat besar penulis panjatkan atas limpahan kasih sayangNya, hidayah-Nya dan keridhaan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam rindu kepada utusan yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Skripsi ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Abbanuangne Kabupaten Wajo” disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Penyusunan skripsi ini juga tidak dapat terselesaikan tanpa keterlibatan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang begitu besar penulis sampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE., M.M Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrullah, S.E., M.M, Ketua Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Ruliaty, M.M. Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Asri Jaya, SE., M.M. Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, saran dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang selama ini telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua tersayang bapak Lipu dan Ibu Indo Cala yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, semangat, doa, dan dukungan baik berupa material yang tiada hentinya kepada peneliti.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Kesadaran penulis atas tidak sempurnanya skripsi ini hadir karena penulis yakin bahwa tidak ada yang sempura selain Allah SWT. Oleh karena itu, saran dan kritik dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk membantu menutupi keterbatasan dan kekurangan skripsi ini. Atas seluruh kesalahan yang ada, mohon maaf yang sangat besar penulis haturkan dari lubuk hati terdalam. Skripsi ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terkhusus bagi almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekian dan terimakasih.

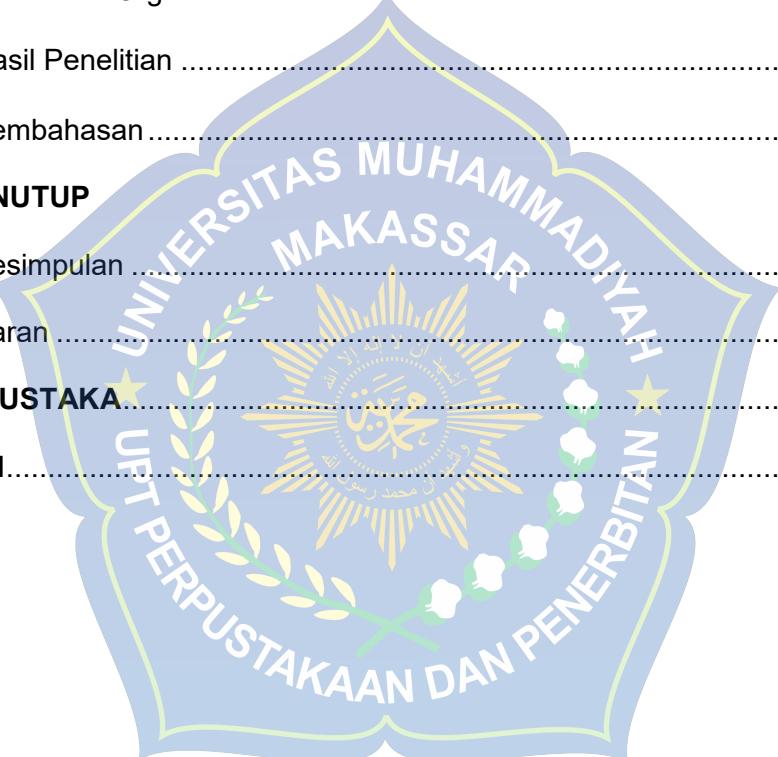
Makassar, Agustus 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iii
<b>ABSTRAK</b>	iv
<b>ABSTRAK</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Teori .....	6
B. Tinjauan Empiris .....	22
C. Kerangka Pikir.....	26
D. Hipotesis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	27
C. Jenis Dan Sumber Data .....	27
D. Populasi Dan Sampel Penelitian .....	28

E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	31
1. Sejarah dan profil desa abbanuangnge .....	31
2. Visi dan Misi .....	34
3. Struktur Organisasi.....	35
B. Hasil Penelitian .....	42
C. Pembahasan .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63
<b>LAMPIRAN</b> .....	66



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penilaian Efektivitas .....	20
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 4.1 Laporan keuangan Alokasi Dana Desa Abbanuangnge .....	42
Tabel 4.2 Rasio pertumbuhan Alokasi Dana Desa Abbanuangnge .....	44
Tabel 4.3 Laporan keuangan Alokasi Dana Desa Abbanuangnge .....	47
Tabel 4.4 Rasio pertumbuhan Alokasi Dana Desa Abbanuangnge .....	48



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	35
Gambar 4.2 Rasio pertumbuhan realisasi Pendapatan ADD Abbanuangnge.....	45
Gambar 4.3 Rasio pertumbuhan realisasi Pendapatan ADD Abbanuangnge.....	46
Gambar 4.4 Rasio efektivitas Alokasi Dan Desa Abbanuangnge .....	50



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan desa suatu pengakuan dan penghormatan, redistribusi sumber daya serta kewenangan pembangunan secara penuh. Undang-undang tersebut memberikan tanda yang jelas bahwa desa harus mampu menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Desa bukan lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek untuk pembangunan yang dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri. Sedangkan menurut Endah (2018) Desa bukan dijadikan sebagai subjek untuk pembangunan yang dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri.

Pembangunan desa merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional, yang tidak dapat dilepaskan dari otonomi desa. Menurut Setyowati (2019) Otonomi daerah merupakan suatu konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri oleh masing-masing desa atau daerah yang sangat berbeda-beda, semua itu merupakan langkah nyata pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Untuk memperkuat upaya pemerintah menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pada tahun 2015 pemerintah pusat mulai memberikan dana bantuan yang kemudian dikenal dengan dana desa guna menciptakan pemerataan pembangunan desa, terutama untuk desa yang tergolong dalam

kategori desa tertinggal (Asmawati, 2019).

Perkembangan suatu desa yang baik dapat dilihat dari segi pengelolaan keuangan, yang memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola keuangan tetapi juga memerlukan dana yang memadai untuk membangun desa. Pengelolaan dana desa yang baik sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan dan masa depan desa, berkembangnya suatu desa tergantung dari bagaimana sumber daya manusia yang ada di desa tersebut dalam mengelola keuangan desanya, pengelolaan dana desa yang baik akan menunjukkan pertumbuhan desa yang baik pula. Untuk pemerintah desa harus memperhatikan penggunaannya dan peruntukannya agar dapat memberikan manfaat positif untuk pembangunan desa kedepannya.

Laporan keuangan desa merupakan salah satu bentuk transparansi yang merupakan syarat dasar pertanggungjawaban berupa keterbukaan pemerintah desa untuk pengelolaan sumber daya publik yang berorientasi baik bagi masyarakat desa. Tujuan akuntansi desa adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara akurat sehingga dapat dicatat dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja keuangan masa lalu. Tujuan dari analisis laporan keuangan tahunan adalah untuk memberikan informasi terkait keputusan kepada pengguna tentang situasi keuangan perusahaan atau kotamadya dan perubahan dalam situasi keuangan. Rasio digunakan dalam analisis kinerja keuangan pemerintah desa sebagai acuan dalam analisis kinerja keuangan pemerintah desa selama satu periode. Angka kunci untuk mengukur hasil regional adalah efisiensi, efektivitas, dan tingkat pertumbuhan

(Agustin, 2021).

Untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa diperlukan transparasi pengelolaan dana tersebut agar tidak terjadi kecurigaan masyarakat terhadap penggunaan dana desa tersebut perlu diterapkan standar dasar dalam pengelolaan suatu alokasi dana desa mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaporan serta tanggung jawab atas pengelolaan dana desa tersebut. Pada dasarnya untuk mengetahui seberapa efisien dan besarnya pengelolaan alokasi dana desa, maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan dana desa. Analisis kinerja keuangan sangat penting dan perlu dilakukan karena dapat menjadi salah satu pedoman yang dijadikan untuk melihat kekurangan serta menjadi patokan perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah dilaksanakan, serta mengevaluasi kinerja keuangan, membantu pemerintah desa mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan merupakan salah satu rasio untuk melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam suatu atau beberapa periode anggaran yang berlangsung. Rasio pertumbuhan pada dasarnya mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan atau mempertahankan kinerja yang dicapai dalam kurun satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya (Listari, 2022). Sedangkan rasio efektivitas merupakan rasio yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah untuk mewujudkan pendapatan yang akan di capai, yang selanjutnya akan disesuaikan dan dibandingkan dengan aturan target yang telah ditetapkan yang dilihat dari potensi desa yang bersangkutan. Apabila tingkat keefektivitas

suatu daerah semakin meningkat maka hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah semakin baik (Ramadhani, 2024).

Pengelolaan keuangan pemerintah Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo yang semakin transparan, jujur, efektif dan efisiensi maka penulis melihat untuk mengevaluasi atau menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa Abbanuangnge selama ini, sehingga menjadi suatu bentuk informasi yang penting dalam pengelolaan keuangan terutama dalam menilai apakah pemerintah desa mampu dan berhasil dalam mengelola keuangan dengan baik serta memberi dampak positif terhadap masyarakat desa, atau sebaliknya yang menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan oleh penulis pada kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio

pertumbuhan pada kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo periode 2017-2021?”

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo periode 2017-2021.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo, serta juga diharapkan dapat menambah referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian yang sejenis.

#### 2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi kepada kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo dalam kaitannya mengenai kinerja keuangan dalam mengelola alokasi dana di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Pengertian Manajemen Keuangan**

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan harus dapat mengendalikan dan mengontrol kegiatan operasional diperusahaan dengan memanfaatkan pihak-pihak yang berada dalam perusahaan yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan perusahaan (Sujarweni, 2017).

Menurut Athoillah (2013) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen mengatakan bahwa manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substansif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Dengan demikian, muncul pertanyaan apa yang dikelola, bagaimana mengelolanya, untuk apa dikelola, dan siapa yang bertindak sebagai pengelola.

Keuangan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemerolehan dan pengelolahan dana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen keuangan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dana dengan biaya-biaya yang diatur seminimal mungkin dan

mengelola dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Sujarweni (2017), pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh dana dengan biaya yang ditetapkan dengan biaya yang paling rendah dan mengelola dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Mustafa (2017), Manajemen Keuangan menjelaskan keputusan-keputusan yang harus diambil, yaitu keputusan investasi, keputusan pembiayaan, atau keputusan untuk memenuhi kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan-laporan yang berisi informasi keuangan perusahaan yang melaporkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

## 2. Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan mengatakan bahwa agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Pada akhirnya bagi pihak pemilik dan manajemen, dengan mengetahui posisi keuangan dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Perencanaan ke depan dengan cara menutupi kelemahan yang ada, mempertahankan posisi yang sudah sesuai dengan yang diinginkan dan berupaya untuk meningkatkan lagi kekuatan yang sudah diperolehnya selama ini.

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratenya hasil yang hendak dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur.

Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:

- a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan Perusahaan.
- c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.

- d. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
- e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
- f. Untuk digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Dalam praktiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut.

a. Analisis Vertikal (Statis)

Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui.

b. Analisis Horizontal (Dinamis)

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang lain. Kemudian, di samping metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, terdapat beberapa jenis-jenis teknik analisis keuangan.

Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Analisis perbandingan antara laporan keuangan

- b) Analisis trend
- c) Analisis persentase per komponen
- d) Analisis sumber dan penggunaan dana
- e) Analisis sumber dan penggunaan kas
- f) Analisis rasio
- g) Analisis kredit
- h) Analisis laba kotor
- i) Analisis titik pulang pokok atau titik impas (*break even point*)

### 3. Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Sujarweni (2017) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian mengatakan bahwa Kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu dilakukan penilaian/pengukuran secara periodik.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (*rating*) yang relevan. *Rating* tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan (misalnya berdasarkan peraturan menteri keuangan) dengan kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif dengan berdasarkan pada laporan keuangan.

Menurut Jumingan (2014) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan mengatakan bahwa analisis kinerja keuangan atau analisis keuangan bank merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank menyangkut *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan bank pada suatu periode tertentu.

Dengan demikian, prosedur analisis meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Review data laporan

Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam memberi pengakuan terhadap pendapatan dan biaya akan menentukan jumlah pendapatan maupun laba yang dihasilkan perusahaan.

b. Menghitung

Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase perkomponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau teknik apa yang akan digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis.

c. Membandingkan atau Mengukur

Langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan adalah membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya.

d. Menginterpretasi

Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil pembandingan/pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan.

e. Solusi

Langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis. Dengan memahami *problem* keuangan dihadapi perusahaan akan menempuh solusi yang tepat. Analisa laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan, adapun tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja yang dicapai perusahaan selama ini dan mengestimasi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Analisa laporan keuangan juga dapat melihat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ke tahun (Sujarweni, 2017).

Menurut Sujarweni (2017) mengatakan bahwa dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan melakukan analisis rasio keuangan adalah untuk dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, menilai kinerja laporan keuangan perusahaan dalam memberdayakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian dan definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan analisis kinerja keuangan adalah proses menghitung, mendeskripsikan, dan memberi solusi terhadap hasil kerja yang dicapai suatu instansi pada periode tertentu.

#### 4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

##### 1) Desa

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015). Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa, yang dikutip dalam skripsi Apriliana (2017).

Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendesa No. 22 Tahun 2016)

Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Permendesa No. 22 Tahun 2016).

## 2) Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Kemasyarakatan.

Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2015) yaitu:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedaikan
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah:

- a. Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan, dan akses kehidupan masyarakat desa.
- b. Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan, dan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
- c. Desa Maju atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa, prakarsa desa membuka lapangan kerja, teknologi tepat guna, dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

### 3) Penyaluran Dana Desa

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Permendagri No.

113 Tahun 2014).

Transparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum. Partisipatif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat. Kemudian Tertib dan Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas (DJBPD, 2016).

Pengelolaan Dana Desa meliputi tiga kegiatan penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014).

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembbiayaanya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan,

besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Diansari, 2015).

c. Pertanggung jawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan pembiayaan program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Marselina Ara Lili (2018:6-10) yang dikutip dari artikel ilmiah menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang diterima secara bertahap dalam setiap tahunnya. Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa. Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) ini berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Supaya setiap kegiatan yang dibiayai mencapai sasarnya yang sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat di desa bersangkutan, maka dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini harus dipenuhi beberapa prinsip diantaranya adalah:

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana

desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan ketersediaan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan mendesak untuk dipenuhi. Pengambilan keputusan untuk menentukan setiap jenis kegiatan yang dibiayai dengan alokasi dana desa ini harus dilakukan melalui jalan musyawarah dan mufakat.
- d. Alokasi dana desa harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa dengan tujuan untuk:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## 5. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Faud (2016) mengatakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

Fathah (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau yang dianggarkan sebelumnya.



Tabel 2.1 Penilaian Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	90% -100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	Kurang dari 60%

*Sumber : Mohammad Mahsun (2016:130)*

Menurut Nurhayati (2015), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan).

Menurut Mahmudi (2010) dalam jurnal (Ni Ketut Erna Rahmawati dan I Wayan Putra, 2016), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah atau yang dianggarkan sebelumnya. Rasio efektivitas adalah tingkat perolehan hasil suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target yang ditentukan.

## 6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini

mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahui pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim,2007).

Menurut Sugiono (2009) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industry.



## B. Tinjauan Empiris

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Yayu Sri Eva (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng sudah baik dalam mengelola keuangan alokasi dana desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas dikategorikan cukup efektif, karena rata-rata efektivitasnya diatas 80% yaitu 82,015%. Sedangkan rasio pertumbuhannya tumbuh secara positif, rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan alokasi dana desa sebesar 67,69% dan rasio pertumbuhan belanja alokasi dana desa sebesar 61,72%.
2.	Dhea Ayu Anggela, Dr. Bambang Suhada2, S.E., M.Si., Ardiansyah Japlani2 , S.E., M.BA., AWM	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Periode (2019-2020)	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini yang menunjukkan 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik.
3.	Fachrul Amanullah Siregar, Fazli Syam BZ	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada desa di	Deskriptif Kualitatif	Dari segi efektivitas pengembangan kinerja keuangan berdasarkan penggunaan ADD tahun 2016 terlihat adanya perbedaan tingkat efektivitas hampir semua desa yang dijadikan sampel penelitian memiliki rasio 100% atau Efektif, hanya

		kabupaten Deli serdang)		beberapa desa yang memiliki rasio sangat rendah tingkat efektivitas seperti Desa Medan Estate yang memiliki rasio efektivitas 69% atau Kurang Efektif, serta analisis efektivitas penggunaan DD tahun 2016, yang menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan DD memiliki rasio 100% atau Efektif, yaitu hanya saja beberapa desa juga terlihat masih memiliki tingkat efektivitas yang rendah, seperti desa Bangun Sari memiliki rasio efektivitas 31% atau Tidak Efektif
4.	Rigel Nurul Fathah (2017)	Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 131,8%. Rasio Efisiensi Keuangan daerah belum Efisien karena selama lima tahun berturut-turut skalanya di atas 100%. Rata-rata rasio Efisiensi Keuangan Daerah selama lima tahun yaitu 109,8%
5.	Arthaingan H.Mutiha (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan rata-rata kinerja pengelolaan kota Bogor berdasarkan rasio keuangan adalah baik. Dilihat dari tabel bahwa secara keseluruhan hubungan kinerja keuangan Kota Bogor seperti rasio derajat desentralisasi selama 5 tahun terakhir (tahun 2010-2014), maka angka rasio ini mencapai 23,09 %. Sementara rasio tingkat kemandirian memiliki rata-rata 31,89%. Rata-rata rasio efektif keuangan daerahnya sebesar 111%.

6.	Mega Oktavia Ropa (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan.
7.	Ni Ketut Erna Rahmawati dan I Wayan Putra (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata- rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, rata- rata tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, rata- rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingakat proporsi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh Dana Perimbangan.
8.	Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.

9.	Serlia Raflesia Lamandas a, Seprianus Ntada (2020)	Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bulili Kecamatan Lore Selaran	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa tahap pengelolaan ADD sudah berjalan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Untuk Penggunaan Dan Pengawasan ADD telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparasi.
10.	Anim Rahmayati	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam analisis laporan keuangan pengelolaan alokasi dana desa perlu adanya rasio keuangan yang dijadikan sebagai pandangan dalam mengelola analisis kinerja keuangan. Dari hasil analisis rasio tersebut dapat diketahui kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa pada kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo. Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut;



### D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan telah dikemukakan, hipotesis yang dihadapi kantor, sebagai berikut:

“Diduga bahwa, semakin meningkat rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan, maka semakin baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa pada Kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan, mulai bulan April Hingga Mei 2022.

#### **C. Jenis dan Sumber data**

##### **1. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), yang dapat dibedakan menjadi data interval.

##### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada instansi yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa pada Desa Abbanuangnge periode 2017-2021.

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo.

### 2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di kantor Desa Abbanuangenge Kabupaten Wajo tahun 2017-2021.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan mengcopy file laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017-2021 dan profil kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo.

### 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber pustaka yang mendukung penelitian ini.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini sebagai berikut :

- a) Menghitung rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan dari laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan membuat tabel
- b) Membuat grafik dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.
- c) Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan atau dengan melihat grafiknya.

Adapun rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan desa yaitu :

#### 1. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah desa untuk mempertahankan dan menaikkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode selanjutnya.

Rumus pengukurannya yaitu:

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :  $X_n$  = Tahun yang dihitung

$X_{n-1}$  = Tahun sebelumnya

## 2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pengukurannya menggunakan rumus:



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah dan Profil Desa Abbanuangnge**

Sejarah Desa Sebelum menjadi salah satu desa di wilayah administrative Kecamatan Maniangpajo, Desa Abbanuangnge memiliki berbagai cerita yang melatar belakangi nama Desa Abbanuangnge. Konon di daerah ini terdapat sebuah gunung yang bernama “Bulu Abbanuangnge” yang jika dibedah secara harfiah yang dimana kata Abbanuangnge merupakan kata dasar dari kata “Wanua” yang artinya tempat tinggal.

Gunung ini dulunya menjadi tempat bermukim masyarakat dahulu, masyarakat yang bermukim tersebut banyak melakukan aktifitasnya di kaki gunung. Terkait sejarah kuno minim keterangan yang dapat mendeskripsikan kehidupan masyarakat abbanuangnge pada masa itu, berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa kehidupan masyarakat modern bermula pada sekitar tahun 1980-an yang dimana pada waktu itu daerah Abbanuangnge saat ini dulunya adalah wilayah bagian dari Desa Kalola. Kemudian pada tahun 1982 Desa Kalola mengalami pemekaran wilayah yang dimana hasil dari pemekaran desa itu adalah Desa Kalola dengan Desa Mattirowalie. Kemudian pada tahun 1994 Desa Mattirowalie dimekarkan sehingga menjadi desa Mattirowalie dan Desa Abbanuangnge. Pada awal mula Desa Abbanuangnge menjadi wilayah yang otonom yang pada masa itu dipimpin oleh Bapak Ciming, dan pada masa kepemimpinan inilah Desa Abbanuangnge dibagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Langkauttu dan Dusun Labakka.

Luas Desa Desa Abbanuangnge terletak di dataran tinggi dengan ketinggian ±78 dpl meter di atas permukaan laut, Parameter iklim meliputi curah hujan dan hari hujan, suhu/temperature udara, kelembaban udara, kecepatan dan arah angin, dan lama penyinaran matahari. Luas Wilayah Dusun Langkauttu:1.513,93 Ha, Dusun Labakka :1.543,93 Ha Jumlah 3.057,86 Ha. Batas Wilayah Adapun batas-batas wilayah Desa Abbanuangnge sebagai berikut: Sebelah Utara: Desa Minangatellue, Sebelah Timur: Kecamatan Gilireng, Sebelah Selatan: Desa Mattirowalie, Sebelah Barat: Desa Sogi. Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan: 5 Km, Jarak Ibukota Kabupaten: 28 Km, Jarak Ibukota Propinsi: 220 Km.

Jumlah Penduduk Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Perkawinan pada usia muda (17-19) tahun masih sering terjadi di desa cukup banyak mereka setelah menikah kemudian pihak laki-laki meninggalkan istri mereka untuk merantau beberapa lama, terutama setelah terjadi kelahiran anak pertama. Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Abbanuangnge seperti Tabel berikut ini: Dusun Langkauttu Laki-Laki 257 Jiwa Perempuan 263 Jiwa Jumlah 520 Jiwa. Dusun Labakka Laki-laki 301 Jiwa, Perempuan 240 Jiwa Jumlah 541 Jiwa.

Dalam aktivitas keseharian, masyarakat Desa Abbanuangnge sangat taat dalam menjalankan ibadah keagamaan. Setiap Rukung Tetangga (RT) dan pedukuhan memiliki kelompok-kelompok pengajian. Pada peringatan hari besar Islam, penduduk Desa Abbanuangnge kerap menggelar acara peringatan dan karnaval budaya dengan tema yang disesuaikan dengan hari besar keagamaan. Sebagian besar warga Desa Abbanuangnge terafiliasi

pada organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah. Gelaran perayaan lain selalu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap pedukuhan akan turut serta dan semangat menampilkan ciri khasnya dalam acara peringatan dan karnaval.

Kelompok pemuda di Desa Abbanuangnge yang tergabung dalam kelompok pegiat Karang Taruna menjadi aktor utama dalam banyak kegiatan desa. Kelompok ini aktif menggelar program kegiatan untuk isu demokrasi kepada warga, penguatan ekonomi produktif, pelatihan penanggulangan bencana, dan kampanye Gerakan Remaja Sayang Ibu (GEMAS). Penduduk asli Desa Abbanuangnge yang tinggal di sulawesi dan sekitarnya misalnya, mereka membentuk paguyuban untuk memelihara silaturahmi antar sesama warga perantauan. Setiap bulan diadakan kegiatan arisan keliling secara bergilir di setiap tempat anggotanya. Setiap dua tahun sekali diadakan pula kegiatan mudik bersama ke kampung halaman di Desa Abbanuangnge.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Abbanuangnge:

- a. Kepala Desa: Dania A. Md
- b. Sekretaris Desa: Syafruddin, SH
- c. Kepala Urusan Pemerintahan: Sardiana
- d. Kepala Urusan Pembangunan: Amrullah
- e. Kepala Urusan Kesra: Agusnawang S. Pd
- f. Kepala Urusan Keuangan: Indra Sri Dewi
- g. Kepala Dusun Langkaauttu: Sahril
- h. Kepala Dusun Labakka: Kaharuddin

## 2. VISI dan MISI

### a. VISI

"Terwujudnya masyarakat Desa Abbanuangnge yang Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat"

### b. MISI

Untuk melaksanakan visi Desa Senggigi dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Jangka Panjang
  - Melanjutkan Pembangunan Desa yang belum terlaksana
  - Meningkatkan Kerjasama antara pemerintah Desa dengan Lembaga desa yang ada
  - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.
- 2) Pembangunan Jangka Pendek
  - Mengembangkan dan Menjaga serta melestarikan ada istiadat desa terutama yang telah mengakar di Desa Abbanuangnge.
  - Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat.
  - Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi.
  - Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Abbanuangnge.

### 3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Abbanuangnge

#### 4. Uraian Tugas

##### a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala desa memiliki fungsifungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah,
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, Kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna,

- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sekretaris desa mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan, meliputi :

- Melaksanakan urusan tata naskah
  - Administrasi surat menyurat dan ekspedisi, dan
  - Pengelolaan arsip.
- 2) Melaksanakan urusan umum, meliputi :
    - Penataan administrasi kepala desa dan perangkat desa,
    - Penyediaan prasarana kepala desa dan perangkat desa,
    - Penyediaan prasarana kantor desa,
    - Penyiapan rapat-rapat,
    - Pengadministrasian aset dan inventarisasi,
    - Penyiapan kegiatan perjalanan dinas, dan
    - Pelayanan umum.

- 3) Melaksanakan urusan keuangan, meliputi :

- Pengurusan administrasi keuangan,
- Pengadministrasian sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
- Verifikasi administrasi keuangan, dan

- Administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan, meliputi :
- Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
  - Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
  - Melakukan monitoring dan evaluasi program.
- c. Kepala Urusan
- Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, kepala urusan tersebut meliputi :
- 1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi :
    - Melaksanakan urusan tata naskah,
    - Pengelolaan administrasi surat menyurat dan ekspedisi,
    - Pengelolaan arsip desa,
    - Penataan administrasi kepala desa dan perangkat desa,
    - Penyediaan prasarana kepala desa dan perangkat desa,
    - Penyediaan prasarana kantor,
    - Penyiapan rapat-rapat,
    - Pengadministrasian aset dan inventarisasi,
    - Penyiapan kegiatan perjalanan dinas, dan
    - Pelayanan umum.
  - 2) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi :

- Pengurusan administrasi keuangan,
- Pengadministrasian sumber pendapatan dan pengeluaran,
- Verifikasi administrasi keuangan, dan
- Pengadministrasian penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi :

- Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa),
- Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
- Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
- Penyusunan laporan.

d. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dan berkedudukan. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dipimpin oleh terdiri dari seksi pemerintahan, seksi pelayanan dan seksi kesejahteraan. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi :

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,
- Menyusun rancangan regulasi desa,
- Pembinaan masalah pertanahan,
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban,
- Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,

- Pengelolaan administrasi kependudukan,
- Penataan dan pengelolaan wilayah, serta
- Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

2) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi :

- Melaksanakan penyuluhan, motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
- Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, dan
- Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

3) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
- Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan
- Sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

#### e. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh kepala dusun.

Kepala dusun bertugas membantu kepala desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala dusun memiliki fungsi :

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban,
- b) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
- c) Pembinaan mobilitas kependudukan,
- d) Penataan dan pengelolaan wilayah,
- e) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya,
- f) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan
- g) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## B. Hasil penelitian

Analisis kinerja keuangan kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja keuangan kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dari data tersebut nantinya dapat memberikan

gambaran informasi mengenai kinerja keuangan kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2017- 2021). Adapun hasil dari analisis rasio tersebut sebagai berikut:

### 1. Rasio Pertumbuhan

*Growth ratio* (ratio pertumbuhan) adalah ratio yang digunakan untuk menunjukkan tingkat persentase pertumbuhan dari waktu ke waktu. *Growth ratio* biasanya dimanfaatkan perusahaan untuk menghitung pertumbuhan kinerja perusahaan bersangkutan. Dalam penelitian ini Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah desa untuk mempertahankan dan menaikkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode selanjutnya.

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo sebagai berikut:

Tabel 4.1

#### Laporan keuangan Alokasi Dana Desa Abbanuangnge

Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021

No	Tahun	Realisasi Pendapatan ADD	Realisasi Belanja ADD
1	2017	Rp 1.230.000.000	Rp 1.230.000.000
2	2018	Rp 1.285.000.000	Rp 1.285.000.000
3	2019	Rp 1.350.000.000	Rp 1.350.000.000
4	2020	Rp 1.380.000.000	Rp 1.380.000.000
5	2021	Rp 1.430.000.000	Rp 1.420.000.000
<b>TOTAL</b>		Rp 6.675.000.000	Rp 6.665.000.000

Sumber Data: APBDesa Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo tahun 2017 sampai tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Tahun 2017 =  $\frac{\text{Rp } 1.230.000.000 - 0}{0} \times 100 = 0\%$
- b. Tahun 2018 =  $\frac{\text{Rp } 1.285.000.000 - \text{Rp } 1.230.000.000}{\text{Rp } 1.230.000.000} \times 100 = 4,47\%$
- c. Tahun 2019 =  $\frac{\text{Rp } 1.350.000.000 - \text{Rp } 1.285.000.000}{\text{Rp } 1.285.000.000} \times 100 = 5,06\%$
- d. Tahun 2020 =  $\frac{\text{Rp } 1.380.000.000 - \text{Rp } 1.350.000.000}{\text{Rp } 1.350.000.000} \times 100 = 2,22\%$
- e. Tahun 2021 =  $\frac{\text{Rp } 1.430.000.000 - \text{Rp } 1.380.000.000}{\text{Rp } 1.380.000.000} \times 100 = 3,62\%$

Adapun Perhitungan rasio pertumbuhan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Abbanuangne Kabupaten Wajo tahun 2017 sampai tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Tahun 2017 =  $\frac{\text{Rp } 1.822.587.077 - 0}{0} \times 100 = 0\%$
- b. Tahun 2018 =  $\frac{\text{Rp } 1.285.000.000 - \text{Rp } 1.230.000.000}{\text{Rp } 1.230.000.000} \times 100 = 4,47\%$
- c. Tahun 2019 =  $\frac{\text{Rp } 1.350.000.000 - \text{Rp } 1.285.000.000}{\text{Rp } 1.285.000.000} \times 100 = 5,06\%$
- d. Tahun 2020 =  $\frac{\text{Rp } 1.380.000.000 - \text{Rp } 1.350.000.000}{\text{Rp } 1.350.000.000} \times 100 = 2,22\%$
- e. Tahun 2021 =  $\frac{\text{Rp } 1.420.000.000 - \text{Rp } 1.380.000.000}{\text{Rp } 1.380.000.000} \times 100 = 2,90\%$

**Tabel 4.2**  
**Rasio pertumbuhan Alokasi Dana Desa Abbanuangnge**  
**Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021**

No	Realisasi Pendapatan ADD	Rasio Pendapatan	Realisasi Belanja ADD	Rasio Belanja
1	Rp 1.230.000.000	0	Rp 1.230.000.000	0
2	Rp 1.285.000.000	4,47	Rp 1.285.000.000	4,47
3	Rp 1.350.000.000	5,06	Rp 1.350.000.000	5,06
4	Rp 1.380.000.000	2,22	Rp 1.380.000.000	2,22
5	Rp 1.430.000.000	3,62	Rp 1.420.000.000	2,90
<b>Total</b>	<b>Rp 6.675.000.000</b>	<b>15,37</b>	<b>Rp 6.665.000.000</b>	<b>14,65</b>

**Sumber Data: APBDesa Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo**

Berdasarkan tabel 4.2 di atas maka Rasio pertumbuhan Alokasi Dan Desa Abbanuangnge Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021 sebagai berikut:

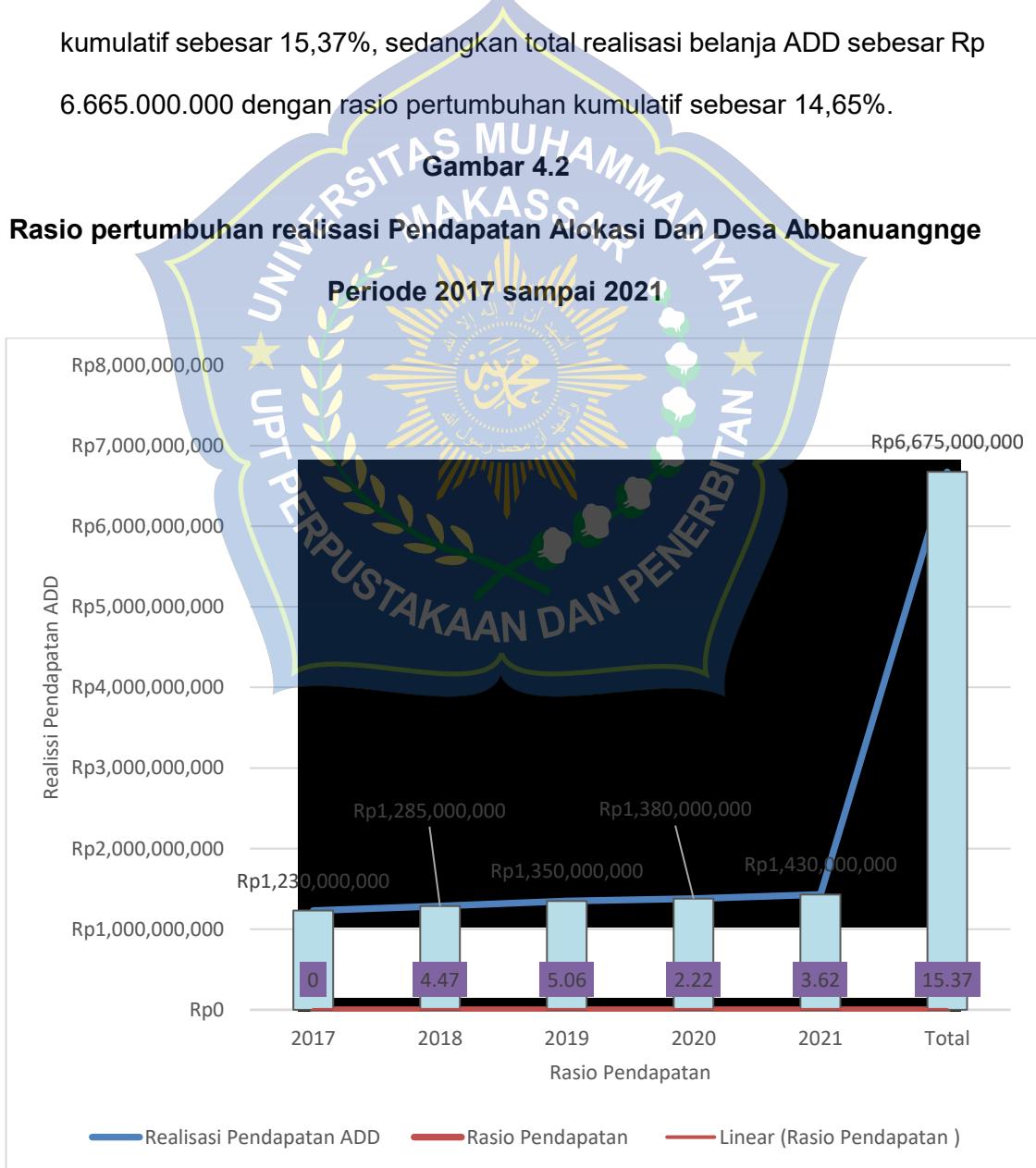
- a Tahun Pertama, realisasi pendapatan dan belanja ADD sebesar Rp 1.230.000.000, sehingga rasio pertumbuhan baik untuk pendapatan maupun belanja adalah 0%, karena belum ada perubahan dari tahun sebelumnya (*baseline*).
- b Tahun Kedua, realisasi pendapatan dan belanja ADD meningkat menjadi Rp 1.285.000.000. Maka, terjadi pertumbuhan sebesar 4,47% pada pendapatan maupun belanja dibandingkan tahun sebelumnya.
- c Tahun Ketiga, realisasi pendapatan dan belanja ADD kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 1.350.000.000. Dengan demikian, rasio pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja ADD adalah 5,06%.
- d Tahun Keempat, realisasi pendapatan dan belanja ADD berada di angka Rp 1.380.000.000, yang menunjukkan sedikit pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Maka rasio pertumbuhan untuk kedua komponen adalah 2,22%.

e Tahun Kelima, realisasi pendapatan ADD mengalami kenaikan menjadi Rp 1.430.000.000, sementara realisasi belanja sedikit lebih rendah yaitu Rp 1.420.000.000. Dengan begitu, rasio pertumbuhan realisasi pendapatan adalah 3,62%, sedangkan rasio pertumbuhan belanja adalah 2,90%.

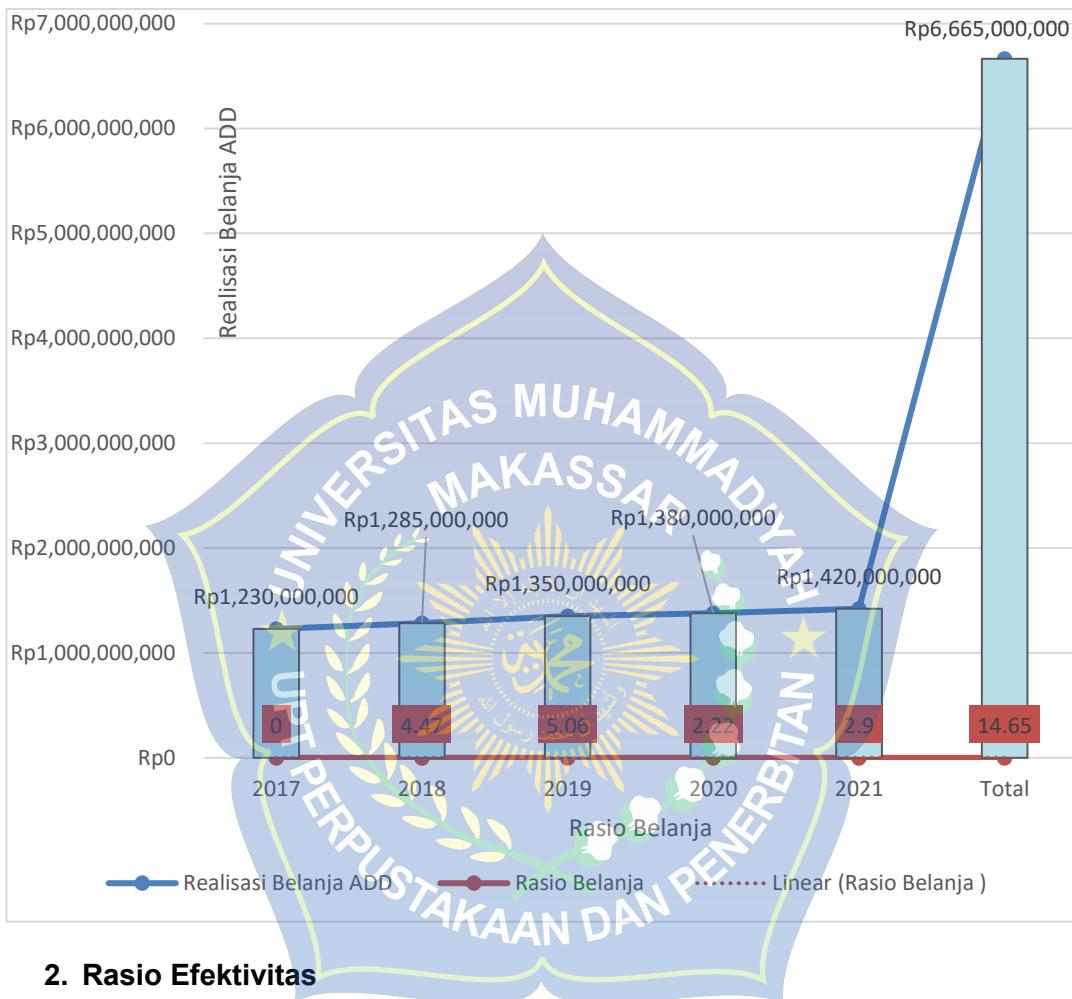
Secara keseluruhan, selama periode lima tahun, total realisasi pendapatan ADD adalah Rp 6.675.000.000 dengan total rasio pertumbuhan kumulatif sebesar 15,37%, sedangkan total realisasi belanja ADD sebesar Rp 6.665.000.000 dengan rasio pertumbuhan kumulatif sebesar 14,65%.

Gambar 4.2

#### Rasio pertumbuhan realisasi Pendapatan Alokasi Dan Desa Abbanuangnge



**Gambar 4.3**  
**Rasio pertumbuhan realisasi Pendapatan Alokasi Dan Desa Abbanuangnge**  
**Periode 2017 sampai 2021**



## 2. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu keadaan yang dapat menunjukkan suatu tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang juga bisa diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam penelitian ini Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Laporan keuangan Alokasi Dana Desa Abbanuangnge**  
**Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021**

No	Tahun	Realisasi ADD	Anggaran ADD
1	2017	Rp 1.230.000.000	Rp 1.230.000.000
2	2018	Rp 1.285.000.000	Rp 1.285.000.000
3	2019	Rp 1.350.000.000	Rp 1.350.000.000
4	2020	Rp 1.380.000.000	Rp 1.380.000.000
5	2021	Rp 1.420.000.000	Rp 1.430.000.000
<b>TOTAL</b>		Rp 6.665.000.000	Rp 6.675.000.000

**Sumber Data: APBDesa Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo**

Perhitungan rasio efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo tahun 2017 sampai tahun 2021 sebagai berikut:

$$\text{a. Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 1.230.000.000}{\text{Rp } 1.230.000.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{b. Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 1.285.000.000}{\text{Rp } 1.285.000.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{c. Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 1.350.000.000}{\text{Rp } 1.350.000.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{d. Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 1.380.000.000}{\text{Rp } 1.380.000.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{e. Tahun 2021} = \frac{\text{Rp } 1.420.000.000}{\text{Rp } 1.430.000.000} \times 100\% = 99,30\%$$

**Tabel 4.4**  
**Rasio pertumbuhan Alokasi Dana Desa Abbanuangnge**  
**Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021**

Tahun	Realisasi ADD	Anggaran ADD	Rasio Efektivitas	Kriteria
<b>2017</b>	Rp 1.230.000.000	Rp 1.230.000.000	100	Efektif
<b>2018</b>	Rp 1.285.000.000	Rp 1.285.000.000	100	Efektif
<b>2019</b>	Rp 1.350.000.000	Rp 1.350.000.000	100	Efektif
<b>2020</b>	Rp 1.380.000.000	Rp 1.380.000.000	100	Efektif
<b>2021</b>	Rp 1.420.000.000	Rp 1.430.000.000	99,30	Efektif
<b>TOTAL</b>	Rp 6.665.000.000	Rp 6.675.000.000	99,85	Efektif

**Sumber Data: APBDesa Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo**

Berdasarkan tabel 4.4 di atas maka Rasio efektivitas Alokasi Dan Desa Abbanuangnge Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021 sebagai berikut:

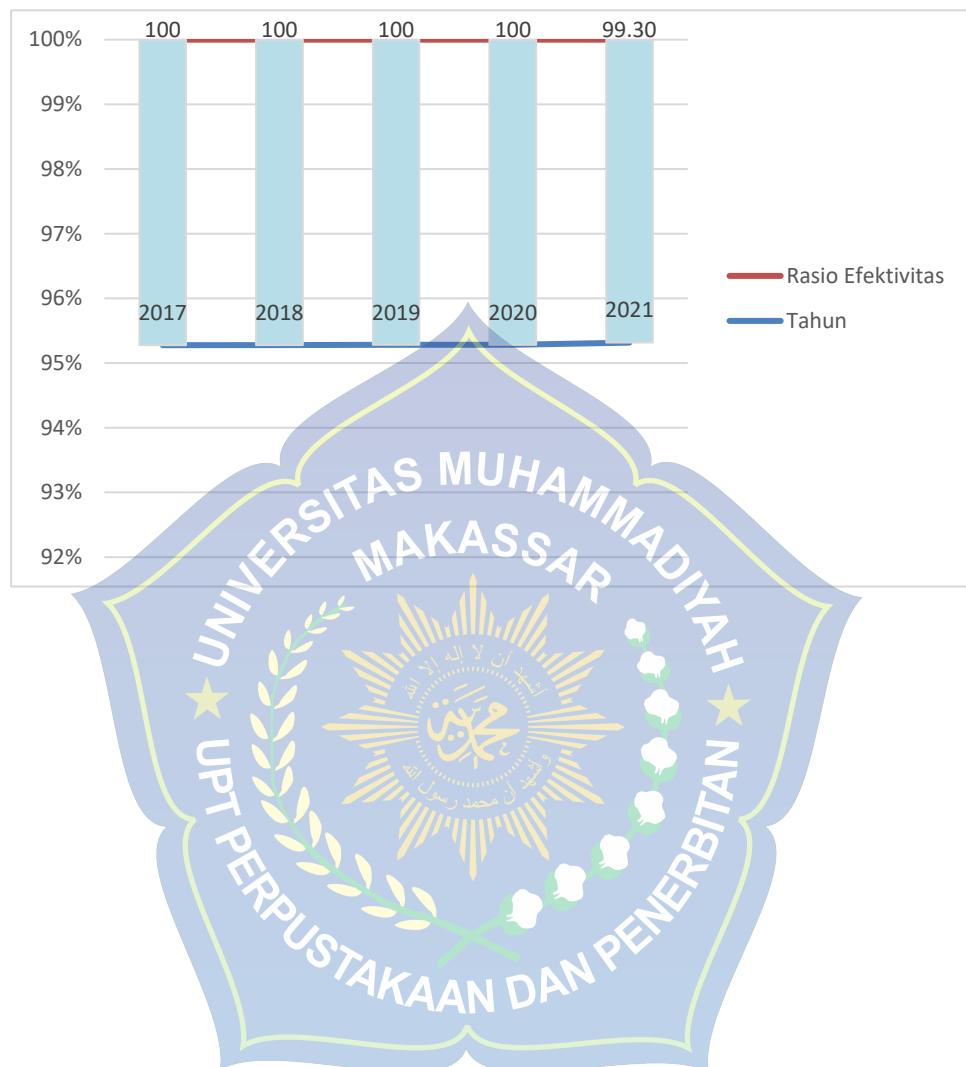
- a. Tahun 2017, total realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1.230.000.000 dan total anggaran Alokasi Dana Desa juga sebesar Rp 1.230.000.000. Maka, rasio efektivitas Alokasi Dana Desa tahun 2017 adalah 100%, yang berarti penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana, dan dikategorikan dalam kriteria Efektif.
- b. Tahun 2018, total realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1.285.000.000, dan total anggarannya pun sama yaitu Rp 1.285.000.000. Rasio efektivitas tahun 2018 adalah sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa pemerintah desa berhasil merealisasikan seluruh anggaran yang direncanakan untuk kegiatan dan program desa. Kriteria efektivitas pada tahun ini termasuk dalam kategori Efektif.
- c. Tahun 2019, total realisasi Alokasi Dana Desa Adalah Rp 1.350.000.000, dengan anggaran yang sama yaitu Rp 1.350.000.000. Dengan demikian, rasio efektivitas Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 kembali mencapai

100%, yang menunjukkan kesesuaian penuh antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta masuk dalam kriteria Efektif.

- d. Tahun 2020, total realisasi dan anggaran ADD berada pada angka Rp 1.380.000.000, sehingga rasio efektivitas tahun ini juga mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tahun 2020 merupakan masa pandemi COVID-19, pemerintah desa tetap mampu merealisasikan anggaran secara optimal. Maka, rasio ini dinyatakan Efektif.
- e. Tahun 2021, realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1.420.000.000, sedangkan total anggaran sebesar Rp 1.430.000.000. Rasio efektivitas pada tahun ini adalah sebesar 99,30%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran berhasil direalisasikan, hanya terdapat selisih sedikit antara rencana dan realisasi. Dengan demikian, rasio ini juga dikategorikan dalam kriteria Efektif.

Secara keseluruhan, dari tahun 2017 hingga tahun 2021, total realisasi Alokasi Dana Desa mencapai Rp 6.665.000.000 dari total anggaran sebesar Rp 6.675.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas kumulatif adalah sebesar 99,85%, yang berarti anggaran ADD yang direncanakan telah dikelola dan direalisasikan secara efisien dan sesuai target. Maka, penggunaan anggaran selama lima tahun tersebut dapat dikategorikan sebagai Efektif.

Kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dan Desa Abbanuangne sudah efektif berdampak baik pada pengembangan infrastruktur dan non infrastruktur dalam suatu desa. Adapun grafi Rasio efektivitas Alokasi Dan Desa Abbanuangne berikut:

**Gambar 4.4****Rasio efektivitas Alokasi Dan Desa Abbanuangnge**

## C. PEMBAHASAN

### 1. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan suatu variabel keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, rasio pertumbuhan digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari tahun ke tahun, khususnya dalam pengelolaan pendapatan dan belanja Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja ADD di Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo selama periode 2017–2021, maka diperoleh perhitungan rasio pertumbuhan secara umum terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun tidak selalu konsisten.

Pada tahun 2017, baik realisasi pendapatan maupun belanja ADD tercatat sebesar Rp 1.230.000.000. Karena merupakan tahun awal pengamatan, maka rasio pertumbuhan pada tahun ini dianggap sebagai baseline dan bernilai 0%. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan realisasi menjadi Rp 1.285.000.000, baik pada sisi pendapatan maupun belanja, sehingga rasio pertumbuhan pada tahun ini adalah sebesar 4,47%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perolehan dan pemanfaatan dana desa dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2019, nilai realisasi kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 1.350.000.000, dengan rasio pertumbuhan sebesar 5,06%. Peningkatan ini mencerminkan adanya stabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta kemampuan desa dalam meningkatkan kapasitas pendapatan dan belanja publik. Pada tahun 2020, nilai realisasi pendapatan dan belanja ADD berada di angka Rp

1.380.000.000, yang berarti hanya sedikit pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga rasio pertumbuhan bernilai 2,22%. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya kebijakan penghematan dan refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, pendapatan ADD kembali meningkat menjadi Rp 1.430.000.000, sedangkan belanjanya sedikit lebih rendah yaitu Rp 1.420.000.000. Rasio pertumbuhan pada sisi pendapatan adalah 3,62%, dan pada belanja sebesar 2,90%, yang mengindikasikan adanya upaya peningkatan pengelolaan meskipun belum mencapai nilai optimal seperti tahun 2019. Secara kumulatif, dalam lima tahun terakhir, Total realisasi pendapatan ADD sebesar Rp 6.675.000.000 dengan rasio pertumbuhan 15,37%. Total realisasi belanja ADD sebesar Rp 6.665.000.000 dengan rasio pertumbuhan 14,65%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Abbanuangnge memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga tren positif pertumbuhan pendapatan dan belanja ADD, walaupun sempat stagnan pada masa pandemi.

Menurut Halim (2021), pertumbuhan keuangan daerah dapat menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan dana publik, termasuk dana desa. Pertumbuhan yang konsisten pada pendapatan dan belanja desa mencerminkan adanya perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik dan akuntabel. Sementara itu, Sari dan Yuwono (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan dan belanja pemerintah desa harus diikuti dengan pertumbuhan output atau dampak pembangunan agar keberlanjutan pengelolaan keuangan dapat dipertahankan. Artinya, rasio pertumbuhan bukan hanya indikator finansial, tetapi juga dapat menggambarkan kinerja pembangunan desa secara umum.

Putri dan Wijaya (2021) dalam penelitiannya tentang efektivitas pengelolaan ADD di Provinsi Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa desa yang memiliki rasio pertumbuhan belanja yang seimbang dengan pendapatan cenderung memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi terhadap pembangunan desa. Rahman dan Lestari (2023) mengkaji kinerja keuangan desa di Kabupaten Bone dan menemukan bahwa pertumbuhan pendapatan yang stabil menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penggunaan ADD secara efisien. Amalia et al. (2024) meneliti perkembangan keuangan desa di wilayah Indonesia Timur dan menyatakan bahwa desa-desa dengan pertumbuhan ADD di atas 10% selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan dalam pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan Alokasi Dana Desa Desa Abbanuangnge secara umum menunjukkan tren pertumbuhan positif dan konsisten, dengan pengecualian pada tahun 2020 akibat kondisi nasional (pandemi). Pertumbuhan ini menjadi indikator bahwa desa memiliki kemampuan fiskal yang meningkat dalam mengelola dana desa, meskipun tetap perlu perhatian untuk menjaga kesinambungan dan efisiensi penggunaan anggaran, khususnya pada sektor belanja yang menjadi instrumen pembangunan langsung masyarakat.

Pertumbuhan pendapatan dan belanja ADD di Desa Abbanuangnge selama periode 2017–2021 memberikan gambaran bahwa kebijakan fiskal desa dikelola dengan cukup stabil dan adaptif. Meskipun terjadi stagnasi pada tahun 2020, kondisi ini dapat dimaklumi karena pandemi COVID-19 memengaruhi hampir seluruh aspek keuangan di berbagai tingkatan

pemerintahan. Namun yang patut diapresiasi adalah keberhasilan desa untuk kembali meningkatkan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya, menandakan adanya upaya pemulihan yang nyata. Jika ditinjau lebih lanjut, pola pertumbuhan yang terjadi menunjukkan adanya kemampuan desa dalam memanfaatkan peluang anggaran dari pemerintah pusat secara optimal. Dengan meningkatnya nilai realisasi pendapatan dari tahun ke tahun, maka desa memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendanai program-program pembangunan, terutama yang menyasar kepentingan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun demikian, pertumbuhan yang terjadi tidak selalu diiringi dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi atau seimbang. Seperti pada tahun 2021, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja, yang mengindikasikan potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Hal ini bisa diartikan sebagai bentuk efisiensi atau kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, tetapi juga dapat menjadi sinyal bahwa ada program-program yang belum direalisasikan sesuai perencanaan.

Penting bagi Pemerintah Desa Abbanuangan untuk meninjau kembali penyebab terjadinya selisih tersebut. Jika disebabkan oleh kendala teknis atau administrasi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Namun jika karena adanya efisiensi, maka pendekatan tersebut patut dijadikan model dalam perencanaan anggaran tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan ADD juga harus dianalisis tidak hanya dari aspek nominal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kualitas hidup masyarakat desa. Apakah pertumbuhan belanja ADD benar-benar berdampak pada peningkatan

kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan sarana pendidikan, atau pembangunan infrastruktur dasar. Tanpa indikator dampak tersebut, pertumbuhan hanya akan menjadi angka statistik tanpa makna strategis. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan desa sebaiknya tidak hanya berhenti pada rasio pertumbuhan, tetapi juga dikaitkan dengan indikator outcome dan impact pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sari dan Yuwono (2022) yang menekankan pentingnya hubungan antara pertumbuhan keuangan dengan hasil konkret di masyarakat. Misalnya, meningkatnya akses air bersih, jalan desa yang lebih baik, atau peningkatan kapasitas UMKM lokal.

Dalam konteks keberlanjutan fiskal, pertumbuhan yang konsisten pada pendapatan desa mencerminkan keberhasilan desa dalam menjaga relasi yang baik dengan pemerintah pusat maupun kabupaten. Desa yang mampu menunjukkan kinerja anggaran yang baik umumnya mendapatkan prioritas dalam alokasi dana di masa berikutnya. Oleh karena itu, rasio pertumbuhan yang positif dapat menjadi portofolio kinerja fiskal yang berharga bagi desa. Aspek lain yang juga patut mendapat perhatian adalah kualitas perencanaan desa. Pertumbuhan belanja yang terukur dan tidak berlebihan menunjukkan bahwa desa memiliki perencanaan yang realistik dan terarah. Hal ini penting agar tidak terjadi defisit atau pemborosan anggaran, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas fiskal desa. Rasio pertumbuhan yang positif dan berkesinambungan juga bisa menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dengan melihat tren pertumbuhan lima tahun sebelumnya, pemerintah desa dapat

memperkirakan kapasitas fiskal masa depan, dan menyusun program-program prioritas dengan skala yang lebih tepat.

Pertumbuhan pendapatan dan belanja ADD di Desa Abbanuangnge selama 2017–2021 mencerminkan pola pengelolaan keuangan yang stabil dan cenderung membaik. Meskipun sempat mengalami stagnasi akibat faktor eksternal, desa mampu memulihkan kinerjanya dan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Untuk masa mendatang, penting bagi desa untuk terus memperbaiki kualitas belanja, menekankan transparansi dan akuntabilitas, serta mengaitkan pertumbuhan keuangan dengan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

## 2. Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo selama periode 2017–2021, diperoleh gambaran bahwa pengelolaan anggaran ADD telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Seluruh tahun dalam periode penelitian menunjukkan nilai efektivitas pada angka 100%, kecuali tahun 2021 yang berada sedikit di bawahnya yaitu 99,30%. Capaian rasio efektivitas 100% pada tahun 2017 hingga 2020 menandakan bahwa seluruh anggaran yang telah direncanakan dalam APBDesa berhasil direalisasikan secara maksimal. Bahkan pada tahun 2020 di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mengganggu banyak sector pemerintah Desa Abbanuangnge tetap mampu merealisasikan seluruh anggaran ADD secara utuh. Sementara pada tahun 2021, walaupun tidak mencapai angka sempurna, nilai 99,30% masih dalam kategori Efektif, karena

penyerapannya sangat mendekati target anggaran. Jika dilihat secara keseluruhan, total realisasi ADD selama lima tahun sebesar Rp 6.665.000.000 dari total anggaran sebesar Rp 6.675.000.000, menghasilkan rasio efektivitas kumulatif sebesar 99,85%, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik dan tepat sasaran dalam penggunaan dana. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa telah berhasil mengelola ADD secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, baik dalam pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Efektivitas yang tinggi ini juga mencerminkan perencanaan yang matang dan pengawasan yang baik dalam proses pelaksanaan anggaran desa.

Menurut Mahsun (2021), efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dibandingkan dengan target yang ditentukan. Efektivitas anggaran menunjukkan seberapa besar realisasi anggaran mampu memenuhi tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Apabila rasio efektivitas mendekati atau sama dengan 100%, maka kinerja dinilai efektif, sedangkan bila jauh di bawah 100%, maka dianggap tidak efektif. Selaras dengan teori tersebut, realisasi anggaran ADD di Desa Abbanuangnge menunjukkan kinerja yang efektif secara konsisten, menandakan bahwa pemerintah desa mampu memaksimalkan serapan anggaran sesuai dengan perencanaan. Menurut Mardiasmo (2022), efektivitas dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, termasuk desa, mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mencapai output dari anggaran yang tersedia. Tingkat efektivitas tinggi menunjukkan bahwa pelayanan dan pembangunan yang dihasilkan juga berpotensi berkualitas.

Rohman, A. (2023) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gowa”, menyimpulkan bahwa realisasi anggaran dana desa yang mendekati atau mencapai 100% menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Pemerintah desa yang efektif biasanya ditunjang dengan perencanaan yang realistik dan kemampuan eksekusi yang baik. Nurlaila, S. (2022) dalam jurnal Ekonomi Desa dan Pembangunan Daerah, meneliti efektivitas ADD di Provinsi Sulawesi Selatan dan menyimpulkan bahwa desa dengan serapan anggaran di atas 98% umumnya memiliki kinerja pelayanan publik dan pembangunan yang memuaskan masyarakat. Yusuf, M. & Andini, T. (2024) dalam penelitian “Evaluasi Efektivitas ADD di Masa Pandemi COVID-19”, menunjukkan bahwa desa yang mampu tetap efektif dalam menyerap anggaran selama masa krisis mencerminkan ketahanan kelembagaan dan kualitas pengelolaan yang baik. Desa Abbanuangnge termasuk dalam kategori tersebut dengan capaian 100% pada tahun 2020.

Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai sejauh mana pemerintah desa mampu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dari hasil penelitian, Desa Abbanuangnge menunjukkan performa yang sangat baik dalam pengelolaan ADD selama lima tahun berturut-turut. Hal ini tercermin dari nilai rasio efektivitas yang secara konsisten berada pada angka yang sangat tinggi, yakni 99,85% secara kumulatif. Bahkan, selama empat tahun berturut-turut (2017–2020), realisasi anggaran ADD mencapai 100% penuh.

Kinerja ini menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi kegiatan desa sangat sinkron dan realistik. Pemerintah Desa Abbanuangnge tidak hanya mampu merancang rencana anggaran dengan baik, tetapi juga menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan anggaran yang tersedia. Selain itu, keberhasilan ini mencerminkan adanya sistem pengawasan dan monitoring yang berjalan secara efektif, baik oleh aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun oleh masyarakat sebagai pihak penerima manfaat.

Pada tahun 2021, meskipun terjadi sedikit penurunan efektivitas menjadi 99,28%, hal ini masih berada dalam kategori efektif. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor teknis maupun administratif, seperti keterlambatan distribusi dana, perubahan regulasi dana desa, atau penyesuaian kegiatan akibat situasi pasca-pandemi. Namun, nilai tersebut tetap mencerminkan pengelolaan yang sangat baik karena hanya terdapat selisih anggaran yang sangat kecil antara rencana dan realisasi. Faktor penting yang menunjang efektivitas ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) menjadi kunci tersusunnya program yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Program yang dirancang berbasis aspirasi masyarakat cenderung lebih mudah dilaksanakan dan mendapat dukungan, sehingga memperlancar proses realisasi anggaran. Dari sisi kelembagaan, perangkat desa yang profesional dan memahami tugas serta fungsi pengelolaan keuangan desa juga turut berperan besar dalam tercapainya efektivitas tersebut. Penggunaan sistem administrasi berbasis digital seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)

sangat membantu dalam pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan desa secara akurat dan transparan.

Efektivitas penggunaan ADD di Desa Abbanuangnge juga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur desa. Program-program seperti pembangunan jalan desa, saluran irigasi, posyandu, serta pelatihan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan spesifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga secara substansi terhadap hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Tingginya nilai efektivitas juga mencerminkan rendahnya tingkat penyimpangan anggaran. Tidak adanya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang signifikan menunjukkan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Ini sangat penting sebagai dasar akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap lembaga pengawas dan masyarakat. Efektivitas pengelolaan ADD juga memberi dampak terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun sinergi antara pemerintah desa dan warga untuk mendukung program pembangunan ke depan. Desa yang memiliki kredibilitas tinggi dalam pengelolaan anggaran biasanya juga lebih mudah mendapatkan dukungan program lintas sektoral dari kabupaten maupun provinsi. Jika ditinjau dari aspek tata kelola keuangan, efektivitas ADD di Desa Abbanuangnge mencerminkan implementasi prinsip anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), di mana pengeluaran dikaitkan dengan hasil (outcome) dan bukan hanya output. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap

rupiah yang dikeluarkan memiliki nilai guna yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat tren lima tahun terakhir, Desa Abbanuangnge dapat dijadikan contoh praktik pengelolaan ADD yang efektif. Capaian ini dapat menjadi modal sosial sekaligus rujukan bagi desa-desa lain dalam merumuskan strategi perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan partisipatif. Diperlukan upaya yang konsisten untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini di masa mendatang, seiring dengan bertambahnya kompleksitas kebutuhan pembangunan dan dinamika sosial masyarakat desa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo periode 2017-2021 sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD di Desa Abbanuangnge menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan mencapai 15,37% selama lima tahun terakhir, sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja ADD berada pada angka 14,65%. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan dan kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan akuntabilitas penggunaan dana. Namun, stagnasi yang terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 menjadi catatan penting untuk evaluasi dalam menghadapi kondisi tak terduga
2. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Abbanuangnge selama periode 2017–2021 secara konsisten berada pada kategori efektif, dengan nilai rasio berkisar antara 99,30% hingga 100% setiap tahunnya. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017–2020 sebesar 100%, dan sedikit menurun di tahun 2021 menjadi 99,30%, namun tetap dalam kategori efektif. Secara keseluruhan, rasio kumulatif mencapai 99,85%, yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran ADD hampir seluruhnya sesuai dengan perencanaan, mencerminkan kinerja keuangan yang baik dan pengelolaan dana yang efisien oleh pemerintah desa.

## B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan peneliti sebagai berikut:

### 1. Untuk kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo

Pihak kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo harus lebih teliti dalam melakukan mengunakan anggaran sebaik-baiknya agar kinerja keuangan kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo tergolong Baik dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah direncanakan.

### 2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah perhitungan rasio lain, yang digunakan pada penelitian ini, yang dianggap mempengaruhi kinerja keuangan kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggela, Dhea Ayu (2021). Analisis kinerja keuangan pengelolaan dan desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan periode (2019-2020)(Pada Kantor Desa Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Diss. Universitas Muhammadiyah Metro.
- Amalia, R., Sulaiman, M., & Nurhaliza, S. (2024). Analisis Pertumbuhan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Infrastruktur Desa di Wilayah Indonesia Timur. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 13(2), 101–113.
- Athoillah, A. (2013). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bandung. Fahmi, Irham. 2014. Manajemen Teori, Kasus dan Solusi. Alfabeta, cv: Bandung.
- Eva, Y. S. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Fathah, Rigel Nurul. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*. Vol.8 No.1.
- Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik. Edisi Empat. Salemba Empat: Jakarta.
- Hery. 2014. Analisis Laporan Keuangan. PT Bumi Aksara: Jakarta. Jumingan. 2014. Analisis Laporan Keuangan. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Kasmir. 2011. Analisis Laporan Keuangan. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lamandasa, S. R., & Ntada, S. (2022). Analisis kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan. *Ekomen*, 20(2), 27-38.karya kecamatan lumar." *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 7.1.
- Lili, Marselina Ara. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. Artikel Ilmiah. ([16187-32454-1-SM.pdf](#),diakses tanggal 22 Maret 2019).
- Listari, I., & Wahyono, K. (2022). Analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa*, 4(3), 129–140.
- Machmud, Masita., George Kawung dan Wensy Rompas. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.14 No.2.
- Mahsun, M. (2021). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

- Mardiasmo. (2022). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mutiha, Arthaingan H. (2016) "Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota bogor tahun anggaran 2010-2014." Jurnal Vokasi Indonesia 4.2
- Nurlaila, S. (2022). "Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat". Jurnal Ekonomi Desa dan Pembangunan Daerah, 5(1), 45–56.
- Nurwana, Andi, and Agus Purwanto. "Analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone." Precise Journal of Economic 2.1 (2023): 9-17.
- Putri, F. D., & Wijaya, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Sulawesi Selatan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 8(1), 23–36.
- Ramadhani, A., Sari, E. E., & Muthie, C. N. S. (2024). Analisis pengelolaan dana desa terhadap kinerja perangkat desa dalam aspek efektivitas dan efisiensi pada Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
- Rahmayati, Anim. (2016) "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013." Eka Cida 1.1.
- Rahmawati, Ni Ketut Erna, and I. Wayan Putra. (2016) "Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012." E-Jurnal Akuntansi 15.3: 1767-1795.
- Rahman, A., & Lestari, T. (2023). Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Bone Berdasarkan Rasio Pertumbuhan. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Publik, 11(3), 45–57.
- Rohman, A. (2023). "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gowa". Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 8(2), 101–113.
- Ropa, Mega Oktavia. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. Vol.4 No.2.
- Sari, M. E., & Yuwono, T. (2022). Pengelolaan Dana Desa yang Berkelanjutan: Pendekatan Rasio Keuangan. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 9(2), 67–79.
- Siregar, F. A., & Syam, F. (2017). Analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (studi pada desa di Kabupaten Deli Serdang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 2(4), 93-106
- Sugiono, Arief. 2009. Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan. PT Grasindo, anggota Ikapi: Jakarta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta, cv: Bandung.

Yusuf, M., & Andini, T. (2024). "Evaluasi Efektivitas ADD di Masa Pandemi COVID-19". Jurnal Tata Kelola Keuangan Desa, 6(1), 78–89.





## Lampiran 1

### Surat Permohonan Izin Penelitian

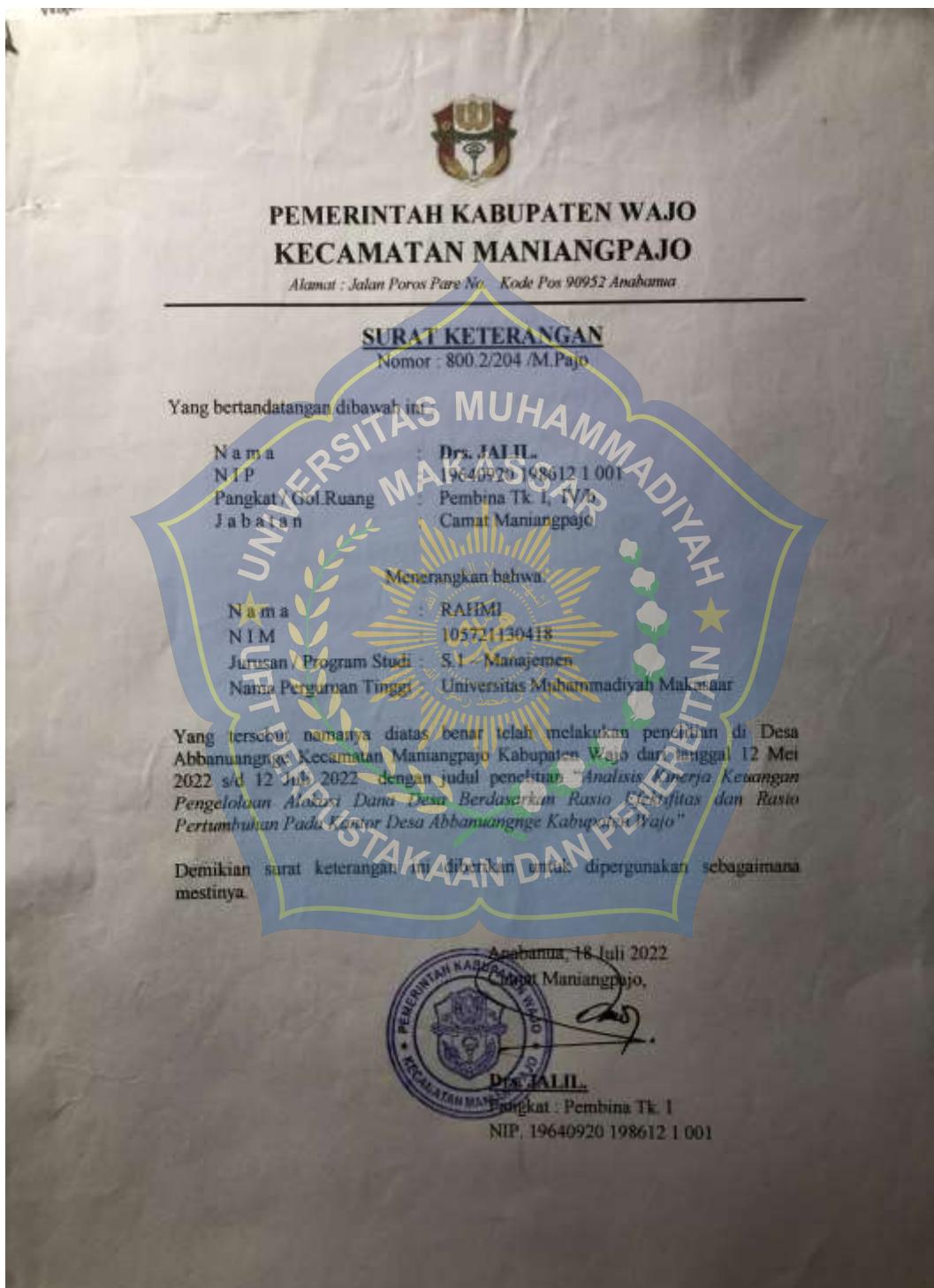


## Lampiran 2

### Surat Rekomendasi Penelitian



**Lampiran 3**  
**Surat keterangan Penelitian**



## Lampiran 4

### LAPORAN APBDESA 2017

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA ABBANUANGNGE TAHUN ANGGARAN 2017

#### I. PENDAPATAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	Pendapatan Asli Desa (PAD)	275.500.000	279.800.000	+4.300.000	PAD
-	Hasil Usaha Desa Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	600.000	600.000	0	PAD
-	Lain-lain PAD yang Sah	265.000.000	265.000.000	0	PAD
-	Pendapatan Transfer	9.900.000	14.200.000	+4.300.000	PAD
-	Dana Desa (DD)	2.100.000.000	2.100.000.000	0	Dana Transfer
-	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP)	820.000.000	820.000.000	0	DD
-	Alokasi Dana Desa (ADD)	50.000.000	50.000.000	0	BHP
-	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	1.230.000.000	1.230.000.000	0	ADD
-	JUMLAH PENDAPATAN	2.385.500.000	2.399.800.000	+14.300.000	Dana Transfer Lain

#### II. BELANJA DESA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	695.000.000	655.000.000	-40.000.000	ADD
-	Belanja Pegawai	340.000.000	340.000.000	0	ADD
-	Operasional Kantor	230.000.000	210.000.000	-20.000.000	ADD
-	Belanja Modal Kantor	125.000.000	105.000.000	-20.000.000	ADD
-	Operasional BPD	9.500.000	7.000.000	-2.500.000	ADD
-	Insentif RT/RW	25.000.000	25.000.000	0	ADD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	Pengelolaan Informasi Desa	3.500.000	3.500.000	0	ADD
-	Penataan Desa	75.000.000	60.000.000	-15.000.000	ADD
-	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>1.520.000.000</b>	<b>1.460.000.000</b>	<b>-60.000.000</b>	<b>DD/SWD</b>
-	Pembangunan Jalan Desa	820.000.000	800.000.000	-20.000.000	DD
-	Pembangunan Drainase dan Irigasi	250.000.000	230.000.000	-20.000.000	DD
-	Pengerukan Saluran Air dan Sungai	75.000.000	70.000.000	-5.000.000	DD
-	Belanja Alat dan Bahan Bangunan	120.000.000	110.000.000	-10.000.000	DD
-	Swadaya Murni (SWD)	255.000.000	250.000.000	-5.000.000	SWADAYA
-	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>130.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>ADD/BHP</b>
-	Kegiatan PKK, LPMD, Karang Taruna	45.000.000	40.000.000	-5.000.000	ADD
-	Insentif Guru Ngaji, Imam Masjid, Posyandu	50.000.000	50.000.000	0	BHP
-	Pelatihan dan Kegiatan Sosial	35.000.000	30.000.000	-5.000.000	ADD
-	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>60.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>ADD</b>
-	Pelatihan Perangkat Desa & BPD	35.000.000	25.000.000	-10.000.000	ADD
-	Pendampingan Teknis dan Sosialisasi	25.000.000	15.000.000	-10.000.000	ADD
-	<b>Bidang Tak Terduga</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>ADD</b>
-	<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>	<b>2.520.000.000</b>	<b>2.397.500.000</b>	<b>-122.500.000</b>	

### III. SURPLUS / DEFISIT

URAIAN	NOMINAL (Rp)
Total Pendapatan	2.399.800.000
Total Belanja	2.397.500.000
Surplus / Defisit	+2.300.000 (SURPLUS)

### IV. PEMBIAYAAN DESA

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	134.500.000	134.500.000	
- Silpa ADD 2016	90.000.000	90.000.000	Saldo Dana ADD Tahun Lalu
- Silpa DD 2016	40.000.000	40.000.000	Saldo Dana DD Tahun Lalu
- Bunga Bank	4.500.000	4.500.000	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	134.500.000	134.500.000	
- Penyertaan Modal BUMDes	134.500.000	134.500.000	
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)</b>	-	<b>2.300.000</b>	

### LAPORAN APBDESA 2018

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA ABBAUANGNGE TAHUN ANGGARAN 2018

##### I. PENDAPATAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	Pendapatan Asli Desa (PAD)	290.000.000	295.000.000	+5.000.000	PAD
-	Hasil Usaha Desa	1.200.000	1.000.000	-200.000	PAD
-	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	270.000.000	273.000.000	+3.000.000	PAD
-	Lain-lain PAD yang Sah	18.800.000	21.000.000	+2.200.000	PAD
-	Pendapatan Transfer	2.300.000.000	2.300.000.000	0	Dana Transfer
-	Dana Desa (DD)	950.000.000	950.000.000	0	DD
-	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP)	55.000.000	55.000.000	0	BHP
-	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.285.000.000	1.285.000.000	0	ADD
-	Bantuan Keuangan Provinsi	10.000.000	9.000.000	-1.000.000	Transfer Lain
<b>-</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.590.000.000</b>	<b>2.595.000.000</b>	<b>+5.000.000</b>	

##### II. BELANJA DESA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
-	Belanja Pegawai	730.000.000	710.000.000	-20.000.000	ADD
-	Operasional Kantor	350.000.000	350.000.000	0	ADD
-	Belanja Modal Kantor	240.000.000	230.000.000	-10.000.000	ADD
-	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	125.000.000	115.000.000	-10.000.000	ADD
-	Pembangunan Jalan Usaha Tani	1.580.000.000	1.550.000.000	-30.000.000	DD/SWD/BKP
-	Drainase & Talud Jalan Lingkungan	600.000.000	600.000.000	0	DD
-	Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	320.000.000	310.000.000	-10.000.000	DD
-	Swadaya Masyarakat	300.000.000	295.000.000	-5.000.000	BKP Provinsi
-	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	250.000.000	245.000.000	-5.000.000	Swadaya
-	Kegiatan Olahraga dan Kepemudaan	150.000.000	145.000.000	-5.000.000	ADD/BHP
-	Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	38.000.000	-2.000.000	ADD
-	Insentif Imam Masjid & Kader Posyandu	50.000.000	48.000.000	-2.000.000	ADD
-	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	60.000.000	59.000.000	-1.000.000	BHP
-	Pelatihan Kewirausahaan & Pengolahan Hasil Laut	85.000.000	80.000.000	-5.000.000	ADD
-	Penuluhan & Sosialisasi Pertanian	60.000.000	57.000.000	-3.000.000	ADD
-	Penyaluran Bantuan Sosial	25.000.000	23.000.000	-2.000.000	ADD
-	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	5.000.000	5.000.000	0	ADD
-	<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>	<b>2.550.000.000</b>	<b>2.490.000.000</b>	<b>-60.000.000</b>	

### III. SURPLUS / DEFISIT

URAIAN	NOMINAL (Rp)
<b>Total Pendapatan</b>	2.595.000.000
<b>Total Belanja</b>	2.490.000.000
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>+105.000.000 (SURPLUS)</b>

### IV. PEMBIAYAAN DESA

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	125.000.000	125.000.000	
- SILPA Tahun 2017	105.000.000	105.000.000	Saldo dari 2017
- Pendapatan Bunga Bank	20.000.000	20.000.000	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	125.000.000	125.000.000	
- Penyertaan Modal BUMDes	125.000.000	125.000.000	
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)</b>	-	0	

### LAPORAN APBDESA 2019

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA ABBANUANGNGE TAHUN ANGGARAN 2019

##### I. PENDAPATAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	Pendapatan Asli Desa (PAD)	310.000.000	308.000.000	-2.000.000	PAD
-	Hasil Usaha Desa	1.500.000	1.400.000	-100.000	PAD
-	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	285.000.000	284.000.000	-1.000.000	PAD
-	Lain-lain PAD yang Sah	23.500.000	22.600.000	-900.000	PAD
-	Pendapatan Transfer	2.450.000.000	2.450.000.000	0	Dana Transfer
-	Dana Desa (DD)	1.000.000.000	1.000.000.000	0	DD
-	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP)	60.000.000	60.000.000	0	BHP
-	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.350.000.000	1.350.000.000	0	ADD
-	Bantuan Keuangan Provinsi	40.000.000	40.000.000	0	Transfer Lain
-	Bantuan Keuangan Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	Transfer Lain
<b>-</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.760.000.000</b>	<b>2.758.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	

## II. BELANJA DESA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>					
-	Belanja Pegawai	765.000.000	760.000.000	-5.000.000	ADD
-	Operasional Kantor	250.000.000	248.000.000	-2.000.000	ADD
-	Belanja Modal Kantor	140.000.000	137.000.000	-3.000.000	ADD
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
-	Pembangunan Jalan Lingkungan	1.650.000.000	1.645.000.000	-5.000.000	DD/SWD/BKP
-	Pembangunan Drainase Pasar Tradisional	300.000.000	298.000.000	-2.000.000	BKP
-	Renovasi RTLH Tambahan	350.000.000	348.000.000	-2.000.000	BKP Provinsi
-	Pengadaan Alat Pertanian & Mesin Padi	200.000.000	195.000.000	-5.000.000	DD
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
-	Kegiatan Sosial & Keagamaan	160.000.000	159.000.000	-1.000.000	ADD/BHP
-	Festival Seni Budaya Desa	50.000.000	50.000.000	0	BHP
-	Pembinaan Karang Taruna & PKK	60.000.000	59.000.000	-1.000.000	ADD
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
-	Pelatihan Digital Marketing untuk UMKM	115.000.000	110.000.000	-5.000.000	ADD
-		60.000.000	58.000.000	-2.000.000	ADD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	Penyuluhan				
-	Kesehatan dan Gizi Balita	55.000.000	52.000.000	-3.000.000	ADD
-	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	5.000.000	5.000.000	0	ADD
-	<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>	<b>2.695.000.00</b>	<b>2.679.000.00</b>	<b>-16.000.00</b>	
-		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**III. SURPLUS / DEFISIT**

URAIAN	NOMINAL (Rp)
Total Pendapatan	2.758.000.000
Total Belanja	2.679.000.000
Surplus / Defisit	+79.000.000 (SURPLUS)

**IV. PEMBIAYAAN DESA**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
Penerimaan Pembiayaan			
- SILPA Tahun 2018	79.000.000	79.000.000	Tidak ada SILPA 2018
- Pendapatan Bunga Bank & Penyertaan	79.000.000	79.000.000	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	
- Penyertaan Modal BUMDes	79.000.000	79.000.000	
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	

**LAPORAN APBDESA 2020**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA ABBANUANGNGE  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. PENDAPATAN**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	Pendapatan Asli Desa (PAD)	320.000.000	317.000.000	-3.000.000	PAD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	Hasil Usaha Desa	2.000.000	1.800.000	-200.000	PAD
-	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	290.000.000	288.000.000	-2.000.000	PAD
-	Lain-lain PAD yang Sah	28.000.000	27.200.000	-800.000	PAD
-	Pendapatan Transfer	2.800.000.000	2.800.000.000	0	Dana Transfer
-	Dana Desa (DD)	1.200.000.000	1.200.000.000	0	DD
-	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP)	70.000.000	70.000.000	0	BHP
-	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.380.000.000	1.380.000.000	0	ADD
-	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000	100.000.000	0	Transfer Lain
-	Bantuan Keuangan Kabupaten	80.000.000	80.000.000	0	Transfer Lain
-	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.120.000.000</b>	<b>3.117.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	

## II. BELANJA DESA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
-	Belanja Pegawai	770.000.000	768.000.000	-2.000.000	ADD
-	Operasional Kantor	380.000.000	380.000.000	0	ADD
-	Belanja Modal Kantor	250.000.000	248.000.000	-2.000.000	ADD
-	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
-		1.700.000.000	1.695.000.000	-5.000.000	DD/SWD/BKP
		0	0		

-	Pembangunan Jalan Lingkungan	600.000.000	600.000.000	0	DD
-	Pembangunan MCK Umum dan Jamban Sehat	250.000.000	250.000.000	0	DD
-	Bantuan Rehabilitasi Rumah Sakit Darurat COVID	300.000.000	295.000.000	-5.000.000	BKP Provinsi
-	Pengadaan Sarana Cuci Tangan dan Masker	100.000.000	100.000.000	0	DD
-	Renovasi Balai Desa	200.000.000	200.000.000	0	BKP Kabupaten
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		130.000.000	130.000.000	0	ADD/BHP
-	Sosialisasi Protokol Kesehatan	50.000.000	50.000.000	0	BHP
-	Penguatan Relawan COVID-19	30.000.000	30.000.000	0	ADD
-	Pembinaan Karang Taruna	50.000.000	50.000.000	0	ADD
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		100.000.000	97.000.000	-3.000.000	ADD
-	Bantuan Modal UMKM terdampak pandemi	60.000.000	58.000.000	-2.000.000	ADD
-	Pelatihan Produksi Herbal & Sanitizer Lokal	40.000.000	39.000.000	-1.000.000	ADD
<b>Belanja Tidak Terduga</b>		20.000.000	20.000.000	0	ADD
<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>	<b>2.820.000.00</b>	<b>2.810.000.00</b>	<b>-10.000.00</b>		
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### III. SURPLUS / DEFISIT

URAIAN	NOMINAL (Rp)
<b>Total Pendapatan</b>	<b>3.117.000.000</b>

URAIAN	NOMINAL (Rp)
<b>Total Belanja</b>	2.810.000.000
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>+307.000.000 (SURPLUS)</b>

#### IV. PEMBIAYAAN DESA

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	307.000.000	307.000.000	
- SILPA Tahun 2019	0	0	
- Pendapatan Bunga Bank & Lainnya	307.000.000	307.000.000	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	307.000.000	307.000.000	
- Penyertaan Modal BUMDes	100.000.000	100.000.000	
- Dana Tanggap Darurat Desa	207.000.000	207.000.000	
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)</b>		<b>0</b>	

#### LAPORAN APBDESA 2021

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA ABBANUANGNGE TAHUN ANGGARAN 2021

#### I. PENDAPATAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	Pendapatan Asli Desa (PAD)	380.000.000	375.000.000	-5.000.000	PAD
-	Hasil Usaha BUMDes	70.000.000	65.000.000	-5.000.000	PAD
-	Swadaya Masyarakat	270.000.000	268.000.000	-2.000.000	PAD
-	Lain-lain PAD yang Sah	40.000.000	42.000.000	+2.000.000	PAD
-	Pendapatan Transfer	3.000.000.000	2.990.000.000	10.000.000	Dana Transfer
-	Dana Desa (DD)	1.250.000.000	1.250.000.000	0	DD
-	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.430.000.000	1.420.000.000	10.000.000	ADD
-	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP)	80.000.000	80.000.000	0	BHP

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	Bantuan Keuangan Provinsi	120.000.000	120.000.000	0	Transfer Lain
-	Bantuan Keuangan Kabupaten	150.000.000	150.000.000	0	Transfer Lain
-	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.380.000.000</b>	<b>3.365.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	

## II. BELANJA DESA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	850.000.000	847.000.000	-3.000.000	ADD
-	Belanja Pegawai	400.000.000	400.000.000	0	ADD
-	Operasional Kantor	280.000.000	278.000.000	-2.000.000	ADD
-	Belanja Modal Kantor	170.000.000	169.000.000	-1.000.000	ADD
-	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	1.750.000.000	1.745.000.000	-5.000.000	DD/Prov/Kab
-	Pembangunan Jalan & Drainase	700.000.000	700.000.000	0	DD
-	Rehabilitasi Saluran Air Bersih	350.000.000	348.000.000	-2.000.000	Provinsi
-	Renovasi PAUD & TK Desa	250.000.000	250.000.000	0	DD
-	Pengadaan Internet Desa (WiFi Publik)	150.000.000	147.000.000	-3.000.000	ADD
-	Penguatan Ketahanan Pangan Mandiri	300.000.000	300.000.000	0	DD
-	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	150.000.000	148.000.000	-2.000.000	ADD/BHP

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
-	Pembinaan Remaja & Karang Taruna	60.000.000	60.000.000	0	ADD
-	Kegiatan Sosial Keagamaan & Hari Besar	40.000.000	38.000.000	-2.000.000	BHP
-	Penguatan Posyandu & Kader Kesehatan	50.000.000	50.000.000	0	ADD
<b>Bidang</b>					
-	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	140.000.000	137.000.000	-3.000.000	ADD/DD
-	Pelatihan Digital				
-	Marketing Produk UMKM	80.000.000	78.000.000	-2.000.000	ADD
-	Bantuan Alat Produksi UMKM	60.000.000	59.000.000	-1.000.000	ADD
-	<b>Belanja Tak Terduga</b>	30.000.000	30.000.000	0	ADD
-	<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>	<b>2.920.000.00</b>	<b>2.907.000.00</b>	<b>-13.000.00</b>	

**III. SURPLUS / DEFISIT**

URAIAN	NOMINAL (Rp)
Total Pendapatan	3.365.000.000
Total Belanja	2.907.000.000
Surplus / Defisit	<b>+458.000.000 (SURPLUS)</b>

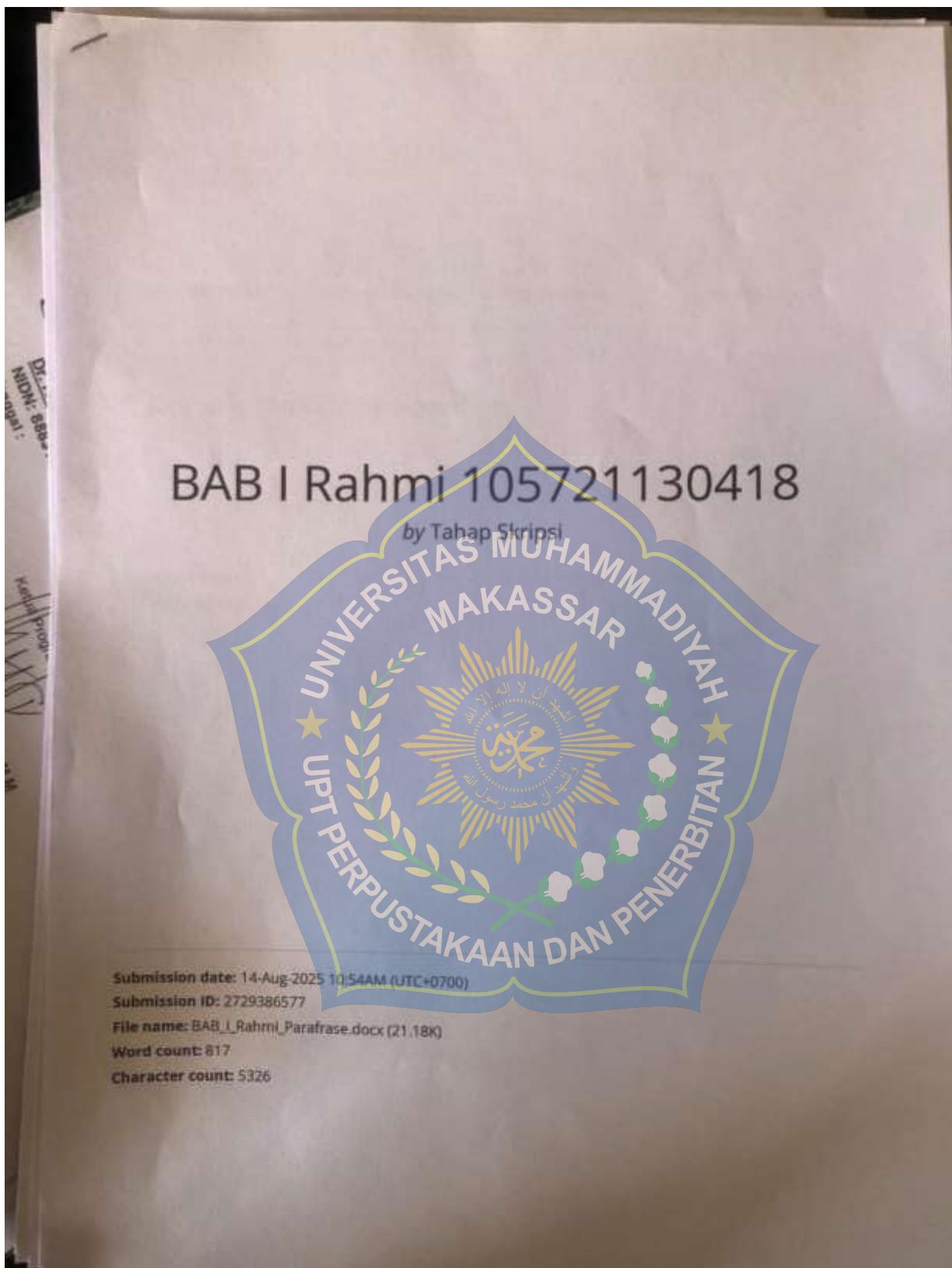
**IV. PEMBIAYAAN DESA**

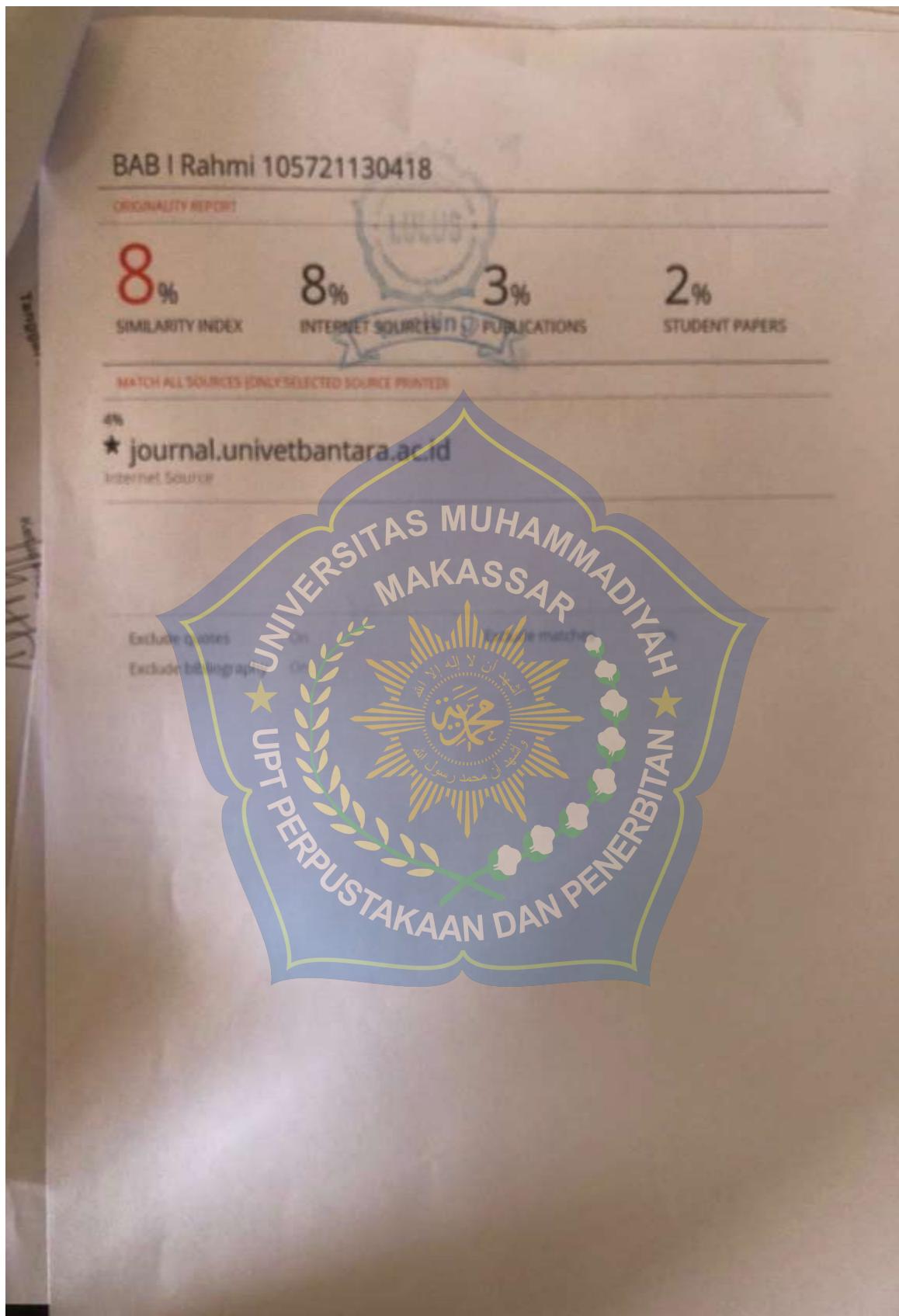
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	458.000.000	458.000.000	
- SILPA Tahun 2020	0	0	
- Pendapatan Investasi BUMDes & Bunga	458.000.000	458.000.000	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	458.000.000	458.000.000	
- Penyertaan Modal BUMDes "Mandiri Sejahtera"	200.000.000	200.000.000	

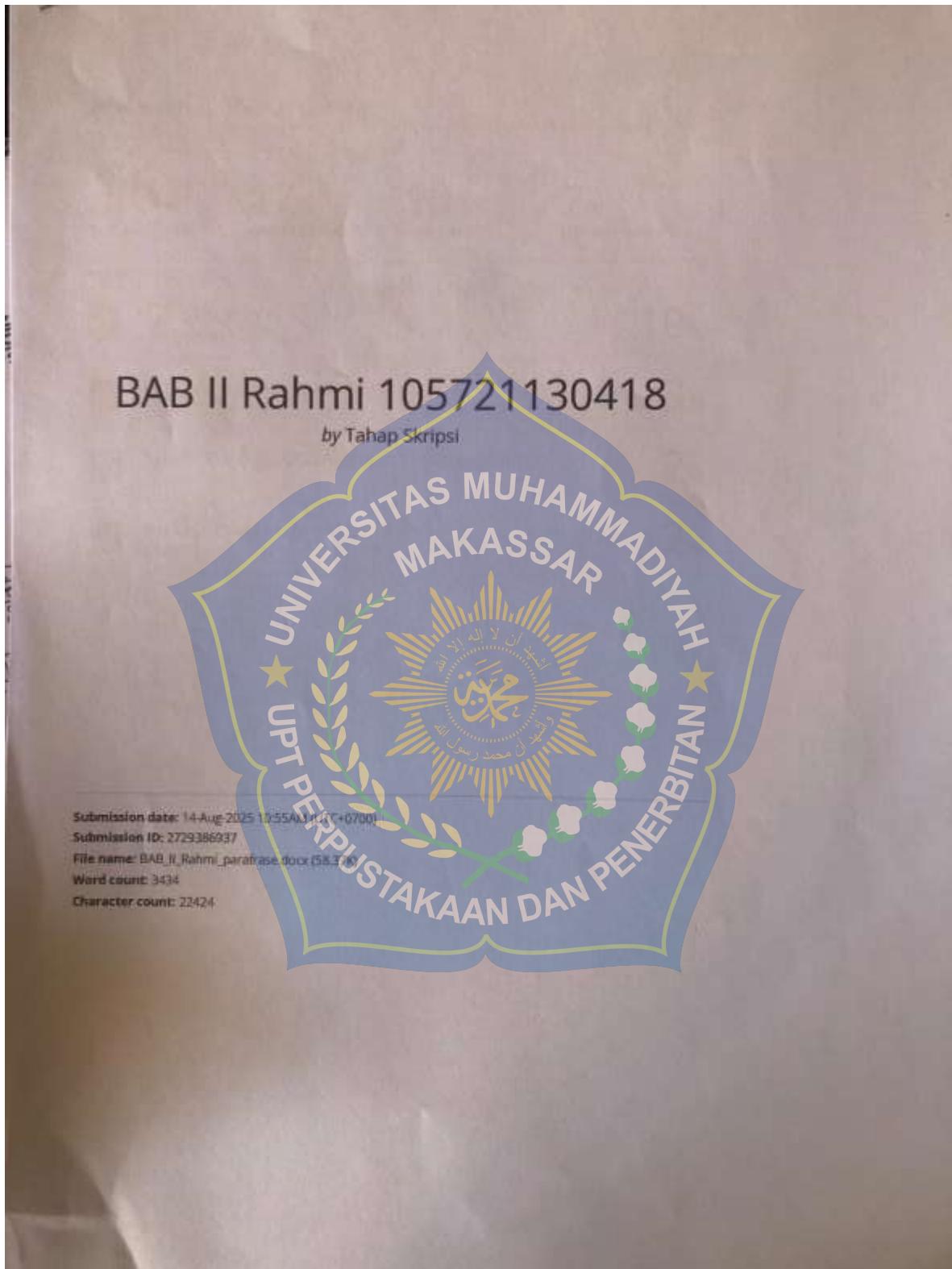
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
- Dana Simpan Pinjam Kelompok Tani	100.000.000	100.000.000	
- Subsidi Internet untuk Warga Miskin	158.000.000	158.000.000	
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)</b>	-	<b>0</b>	

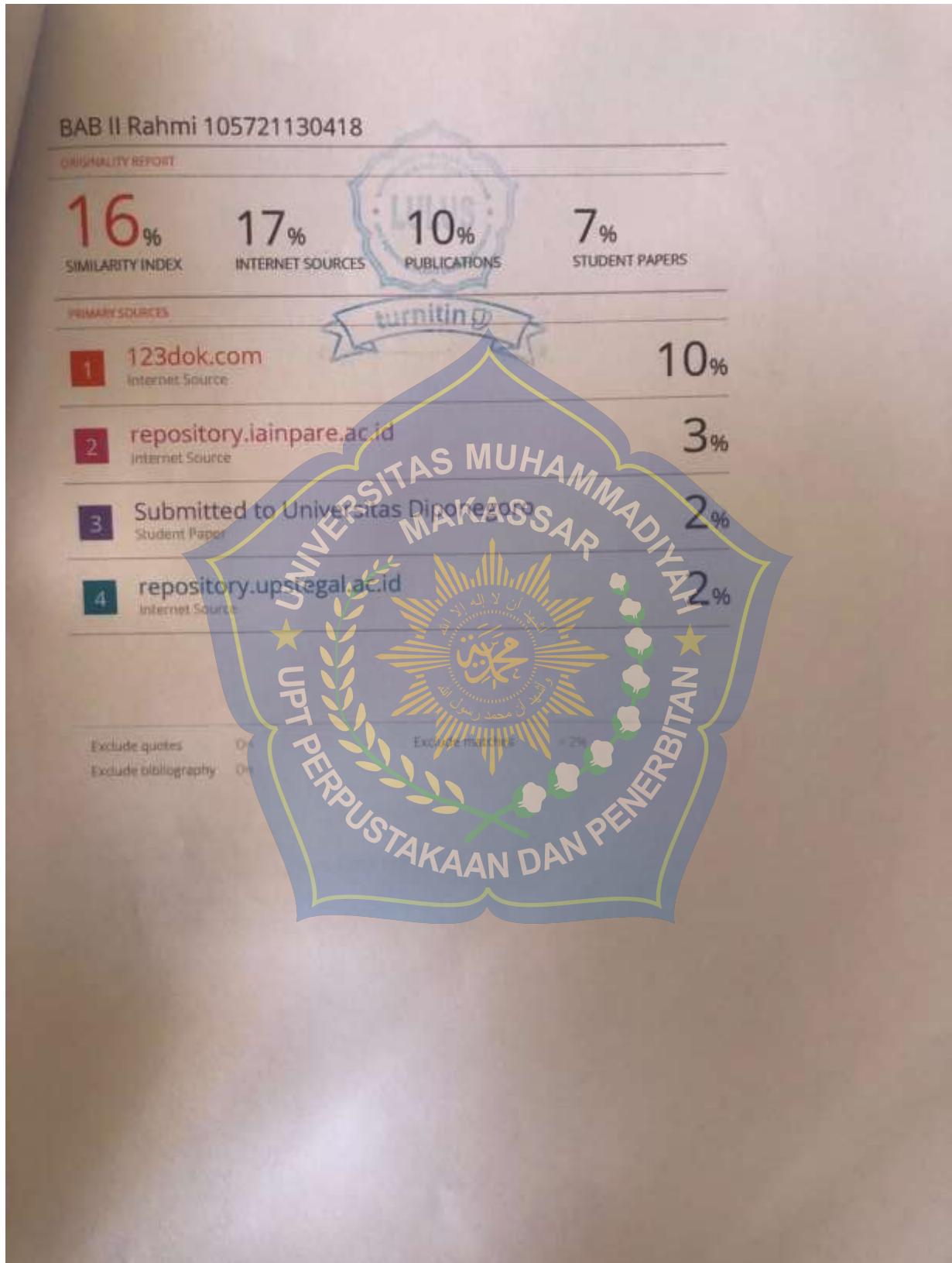


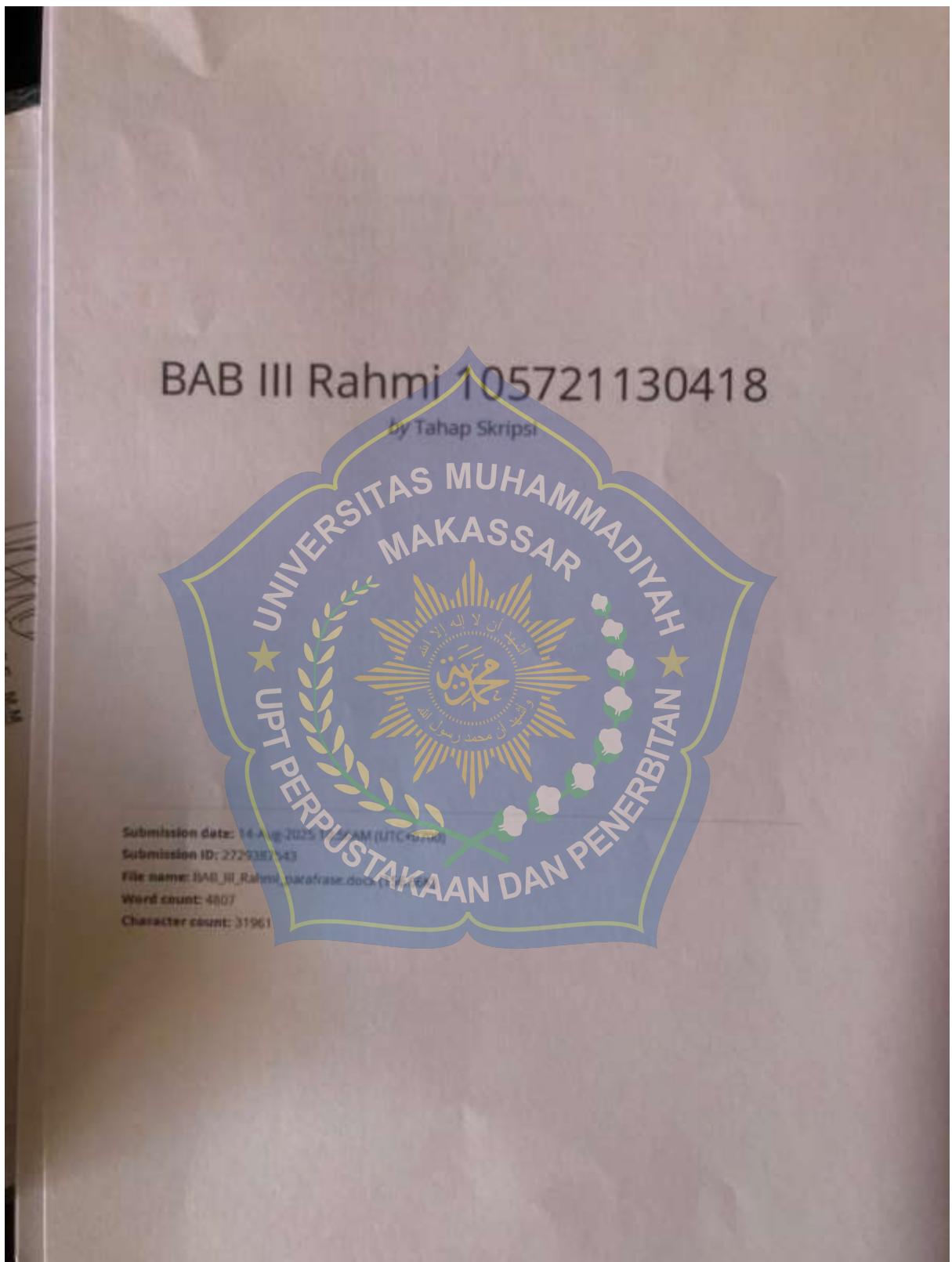














BAB IV Rahmi 105721130418

by Tahap Skripsi



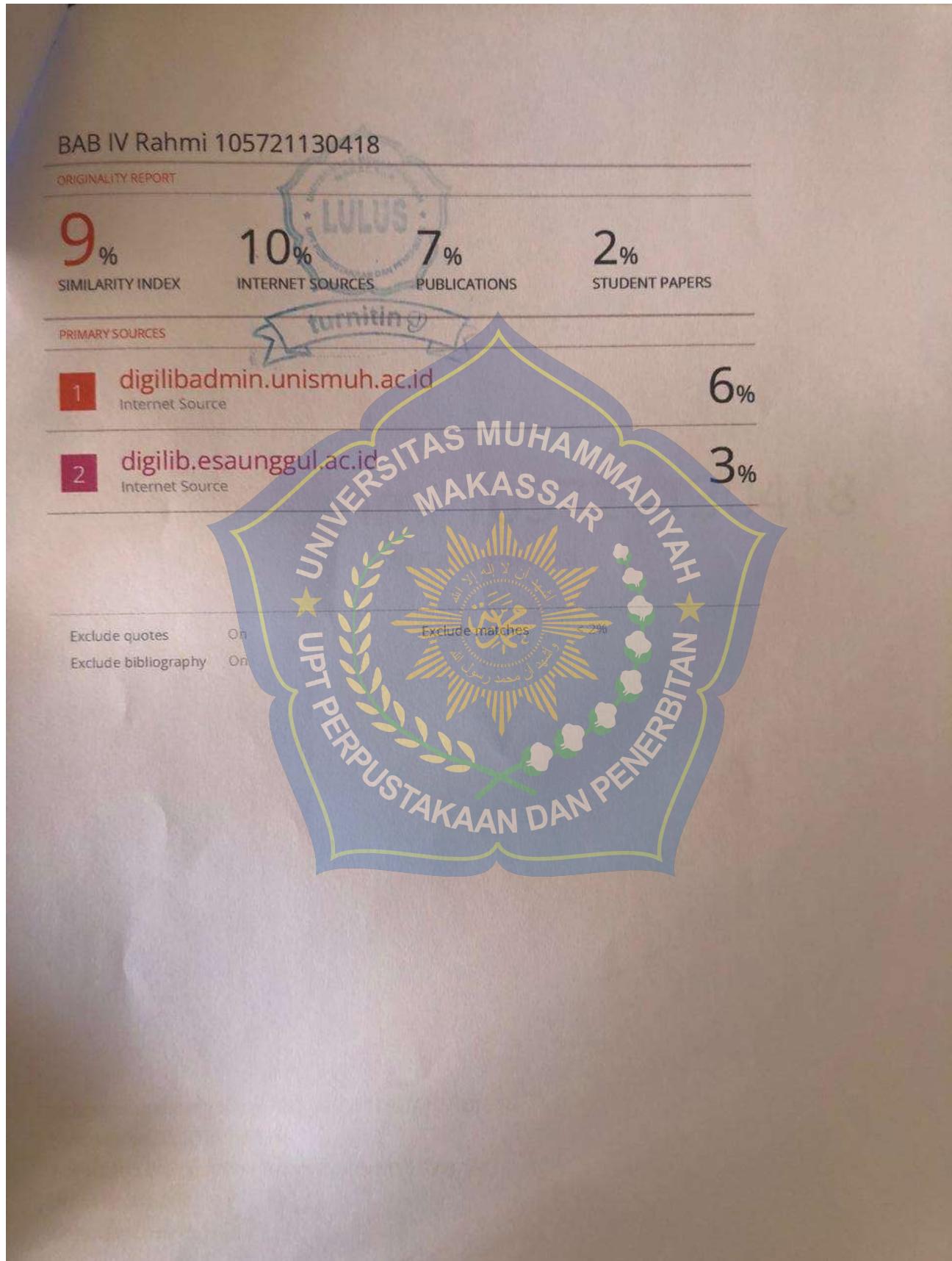
Submission date: 14-Aug-2025 10:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2729387543

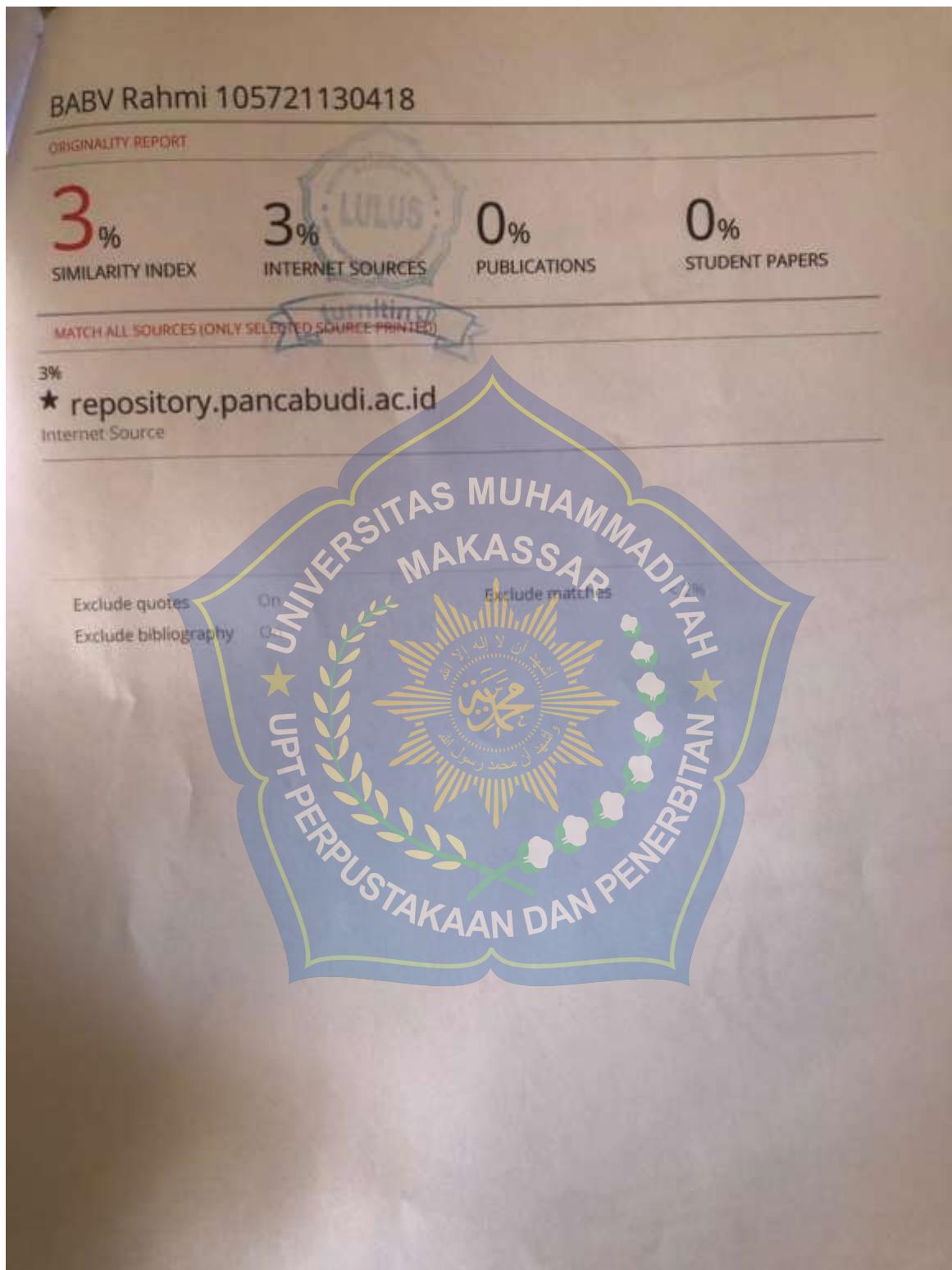
File name: BAB\_IV\_Rahmi\_parafrase.docx (156.66K)

Word count: 4807

Character count: 31961







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rahmi, lahir di Adakkae pada tanggal 29 Agustus 1999. Anak ke empat dari 5 bersaudara, buah hati dari pasangan ayahanda "Lipu" dan ibunda "Indo cala". Penulis pertama kali menempuh bangku Pendidikan tepat pada umur 7 tahun di Sekolah Dasar (SD) pada SD Negeri 334 Sogi pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, dan penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) pada SMP Negeri 3 Maniangpajo dan selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan menengah atas (SMA) pada SMA Negeri 3 Sidrap dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi dan terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Makassar, penulis mengambil program studi Manajamen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan Syukur Alhamdulillah akhirnya penulis menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2025.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, usaha dan disertai do'a dari kedua orang tua beserta saudara dalam menjalani aktivitas akademik diperguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Abbanuangnge Kabupaten Wajo .